

**SKRIPSI**  
**SINERGITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN DESA BUDAYA**  
**MARITIM**

**(Studi Terhadap Pemerintah Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten  
Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**Disusun Oleh:**

**VALENTINUS TRIPUTRA JEHADUT**

**19520117**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1 (S1)**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**

**2023**

**SINERGITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN DESA BUDAYA  
MARITIM**

**(Studi Terhadap Pemerintah Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten  
Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2023**





## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Mei 2023

Waktu : 09.00 WIB.

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>B. Hari Saptning Tyas, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	.....
2. <u>Dr. Supadal, M.Si</u> Penguji Samping I	.....
3. <u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Penguji Samping II	.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Valentinus Triputra Jehadut

Nim : 19520117

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim**” dengan study di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2023



Valentinus Triputra Jehadut

## MOTTO

*“Janganlah hendak kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”.*

(Filipi 4: 6)

*“Hendaknya apapun yang saya miliki, dimana pun saya berada, saya dapat melewati apapun didalam dia yang menjadikan siapa saya”.*

(Filipi 4: 13)

*“Hidup Ini Seperti Sepeda Agar Tetap Seimbang Kau Harus Tetap Bergerak”.*

(Albert Einstein)

*“jika sudah waktunya untukmu, jika waktunya milikmu Tuhan akan bukakan jalan untukmu. Tetap jalani hidup, berdoa dan bersyukur, nikmati proses biar waktu yang menjawab”*

(Valentinus Triputra Jehadut)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala perlindungan, berkat, cinta, dan kasih-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Sinergitas Pemerintah Kalurahan dalam Membangun Kalurahan Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis belajar, berproses, dan menimba ilmu;
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Ibu Hari Saptining Tyas, M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan sehingga sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

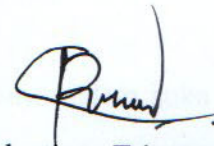


7. Seluruh karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi;
8. Pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tileng yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Untuk teman-teman dekat penulis Hery Kabut, Toni Ampur, Aldyano Jebarus, Didi Syukur, Brian Padar, Febri Mbouk, Gusto Hasiman, Geris Santur, Mario Pau, Tian Sandur. Terima kasih atas dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini; dan
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, skripsi ini terbuka untuk diperiksa ulang untuk dikritik demi mencapai kesempurnaan dan kebenaran yang semakin mendalam.

Yogyakarta, 7 Februari 2023

Penulis



Valentinus Triputra Jehadut

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas semua anugerah, berkat, kasih dan kemurahan-Nya yang begitu luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan ungkapan hormat dan rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha kuasa yang sudah melindungi dan menyertai dalam setiap nafas kehidupan saya;
2. Kedua orang tua saya Bapak Damianus Jehabur dan Ibu Theresia Jehadut atas segala doa, penguatan, dukungan serta motivasi yang tidak pernah henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Untuk Saudara saya Berto Jehabur, Ebi Jehabur, dan Dela Panut. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dan luar biasa bagi saya. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang selalu memberikan saya semangat dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lakukan;
4. Untuk seluruh anggota keluarga besar KA-PERANG. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang selalu memberikan saya semangat dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lakukan;
5. Bapak/Ibu Dosen “STPMD “APMD Yogyakarta; dan
6. Teman-teman dan para sahabat yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka serta mengajarkan saya arti sebuah persahabatan. Terima kasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Literature Review.....	8
F. Kerangka Konseptual.....	16
G. Metode Penelitian.....	33
BAB II PROFIL KALURAHAN TILENG, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	43
A. Sejarah Kalurahan Tileng.....	43

B. Visi dan Misi Kalurahan Tileng .....	43
C. Deskripsi Keadaan Umum Kalurahan Tileng .....	45
<b>BAB III SINERGITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN DESA BUDAYA MARITIM .....</b>	<b>68</b>
A. Sinergitas Pemerintah Kalurahan Tileng dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewah Yogyakarta dalam Membangun Desa Budaya Martim .....	69
B. Program dan Realisasi Pelaksanaan yang dilakukan Oleh Pemerintah Kalurahan Tileng untuk Membangun dan Mengembangkan Desa Budaya Maritim. ....	77
C. Kendala yang dihadapi Kalurahan Tileng dalam Membangun dan Mengembangkan Desa Budaya Maritim. ....	85
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Data Informen.....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 2.1 Komposisi Penduduk Berdasrkan Jenis Kelamin.....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 2.6 susunan Pemerintah Kalurahan Tileng.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 3.1 Data Infromen Berdasarkan Pendidikan.....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 3.2 Data Infromen Berdasarkan Jenis Kelamin.....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 3.3 Data Informen Berdasarkan Usia.....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 2.1 Sturuktur Pemerintah Kalurahan Tileng.....</b>	<b>55</b>
---	-----------



## INTISARI

Sejak diberikan predikat sebagai kalurahan budaya maritim, Kalurahan Tileng berupaya untuk memaksimalkan potensi di bidang kelautan. Dalam kerangka itu, Pemerintah Kalurahan Tileng berikhtiar untuk membangun budaya maritim di Kalurahan Tileng secara kolektif. Pemerintah Kalurahan Tileng berupaya untuk bersinergi dengan Stakeholders guna memaksimalkan potensi di bidang kelautan. Sinergitas ini berbasis pada koordinasi dan komunikasi. Meskipun demikian, koordinasi dan komunikasi ini belum berjalan dengan maksimal terutama dengan masyarakat. Koordinasi dan komunikasi Pemerintah Kalurahan Tileng dengan masyarakat hanya dilakukan melalui ruang publik formal seperti Muskal, sosialisasi, dan pelatihan. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya memahami arah dan tujuan pembangunan budaya maritim. Oleh karena itu, yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah bagaimana sinergitas Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun budaya maritim?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif non-positivisme. Subjek penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri dari Lurah, Pamong, BPKal, Dukuh, dan kelompok nelayan Kalurahan Tileng. Obyek penelitian yaitu Pembangunan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tielng dan Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, dalam membangun budaya maritim, Pemerintah Kalurahan Tileng berupaya untuk bersinergi dengan berbagai Stakeholders, seperti: Dinas Kelautan dan Perikanan, Pendamping Lokal Kalurahan, BPKal Tileng, dan masyarakat. *Kedua*, sinergitas antara Pemerintah Kalurahan Tileng dengan Stakeholders berbasis pada koordinasi dan komunikasi. Secara umum, koordinasi dan komunikasi dengan Stakeholders dilakukan melalui ruang publik formal seperti Muskal, sosialisasi, dan pelatihan-pelatihan. Koordinasi dan komunikasi ini bertujuan agar Stakeholders memahami arah dan tujuan pembangunan budaya maritim. *Ketiga*, adapun program pembangunan budaya maritim yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng, di antaranya: pelebaran jalan menuju “Sekolah Alam”, pengadaan membeler, pembangunan MCK “Sekolah Alam”, penyempurnaan rumah olahan dan peralatan, talud menuju “Sekolah Alam” pesisir, rabat beton jalan menuju “Sekolah Alam”, pagar “Sekolah Alam”, pelatihan kelompok nelayan darat dan laut, dan pembuatan tempat parkir. Semua program ini direalisasikan pada tahun 2022 dan berlokasi di Padukuhan Nanas. *Keempat*, kendala yang dihadapi dalam pembangunan budaya maritim, yaitu: minimnya sumber daya manusia; terbatasnya bahan baku; keterbatasan dana; minimnya partisipasi masyarakat; terbatasnya sumber daya fasilitas; dan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kalurahan Tileng dan masyarakat masih lemah.

Kata Kunci: Sinergitas, Pemerintah Kalurahan, Budaya Maritim

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Pemanfaatan sektor maritim dan kelautan di Indonesia menjadi sangat strategis dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, serta hukum dan keamanan. Budaya maritim merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat khususnya nelayan dan masyarakat pesisir yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut, sehingga keberlanjutan sumber kehidupan mereka tetap terjamin hingga ke anak cucu.

Mastubroto mengemukakan bahwa hampir 90% nelayan di Indonesia masih berskala kecil, dimana nelayan-nelayan ini masih menggunakan pola tradisional seperti masih menggunakan perahu yang masih berteknologi sederhana untuk mencari ikan, sehingga hasil yang didapatkan oleh nelayan-nelayan Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Hal di atas memunculkan ide atau gagasan terkait kebijakan-kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan yang nantinya dapat mengatasi persoalan-persoalan nelayan serta dapat mendorong dan meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan khususnya di bidang ekonomi (Kusnadi, 2003).

Budaya maritim memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir khususnya nelayan yang masih tergolong nelayan tradisional. Kebudayaan masyarakat nelayan adalah sistem gagasan yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga dapat dijadikan referensi perilaku sosial-budaya oleh individu-individu dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Terbentuknya kebudayaan ini melalui sosio-historis yang cukup lama dan interaksi secara terus menerus antara masyarakat dengan lingkungannya (Pratiwi, 2018).

Kebudayaan maritim dapat juga dikatakan sebagai kebudayaan kelautan, hal ini di karenakan kebudayaan maritim yang termasuk dalam kebudayaan merupakan hasil pemikiran yang berasal masyarakat yang hidup di wilayah perairan dan pesisir pantai.

Saat ini, Daerah Istimewa Yogyakarta dikatakan sebagai daerah yang mempunyai budaya maritim. Dilihat dari letak geografis yang strategis berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang merupakan halaman depan dari Indonesia serta memiliki Panjang pantai 113 km. Hal ini tentunya menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta kaya akan Sumber daya Kelautan. Secara Geografis dan Geostrategis Samudra Hindia tidak hanya menyediakan sumber kehidupan bagi nelayan melainkan menjadi sangat penting dalam bidang ekonomi dan juga pertahanan keamanan global. Sekitar 70 persen perdagangan dunia melewati Kawasan Samudra Hindia sehingga memiliki potensi yang sangat prospektif bagi kepentingan Ekonomi.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X telah menjadikan laut sebagai halaman depan, di mana ada pergeseran dari among tani ke dagang layar dengan kata lain arah pembangunan akan digerakan menuju orientasi kemaritiman. Hal ini untuk meningkatkan percepatan atau akselerasi pembangunan kemaritiman di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mempercepat cita-cita di atas diperlukan tindak lanjut secara keseluruhan dan terintegritas dari semua komponen yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dikarenakan hal di atas bukanlah hal yang mudah sehingga perlu di tindak lanjuti oleh semua komponen yang dimaksud.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, telah ditetapkan Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas dan

wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Tujuan dari Pengaturan Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinekatunggalikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan Budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pemerintah desa sebagai institusi sekaligus aktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan desa, termasuk praktik tata kelola pemerintahan desa. Undang-Undang desa mengakui susunan asli pemerintah desa dan menetapkan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dengan demikian, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sekaligus menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Selain itu, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, Pemerintah desa dituntut untuk menjadi aktor sekaligus institusi yang mampu mengelola prakarsa masyarakat karena ia merupakan representasi negara.



Sebagai representasi negara, pemerintah desa dibekali hak untuk mengatur dan mengurus bagian dari hak dan kewenangan desa dan kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus tampil sebagai otoritas yang kuat sekaligus mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

Pembangunan dan pemanfaatan terkait budaya maritim di Indonesia sudah di praktikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Diketahui, pada tahun 2021 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk 34 desa budaya maritim yang terbagi di sepanjang pesisir selatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo dan Bantul. Desa yang dipilih sebagai desa budaya maritim telah melalui kajian ekonomi serta pemetaan wilayah. Tujuan dari dibentuknya desa budaya maritim ini yakni untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan desa budaya maritim dibiaya dengan menggunakan dana keistimewaan dalam bentuk Dana Bantuan Khusus (DKK) dengan nilai yang tidak sama untuk setiap desa sesuai dengan proposal yang diajukan kepada Gubernur DIY.

Kalurahan Tileng yang berada di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu yang dipilih sebagai kalurahan budaya maritim. Pemilihan Tileng sebagai kalurahan budaya maritim mengingat posisinya yang strategis, yakni di pesisir pantai, serta potensi ekonomi kerakyatannya yang relatif bisa diandalkan dibanding kalurahan-kalurahan lain di Kapanewon Girisubo. Predikat Desa budaya maritim ini memberikan peluang terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya bagi nelayan dan pengolah atau pedagang hasil laut di Kalurahan Tileng. Dalam menyiapkan Kalurahan Tileng untuk penerapan predikat tersebut Pemerintah DIY telah memberikan alokasi dana keistimewaan tahap awal pada periode 2021 sebesar 500 juta. Sejauh ini yang sudah dilakukan Kalurahan Tileng dari dana tersebut adalah membangun

sekolah alam dan tempat pengolahan hasil laut. (*Sumber: laporan realisasi penggunaan dana keistimewaan pemerintah Kalurahan Tileng*)

Saat ini, Kalurahan Tileng mendapat predikat Desa Budaya Maritim yang mana secara spesifik didasari karena adanya pantai yang cukup strategis. Selain itu, Budaya Maritim ini sendiri telah digagas oleh kalurahan dan mulai dibenahi oleh Pemerintah Kalurahan Tileng. Penerapan predikat Desa Budaya Maritim yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng dapat dilihat dari membangun sekolah alam dan tempat pengolahan hasil laut serta beberapa agenda lainnya seperti upaya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya nelayan dan para pedagang hasil laut melalui pembuatan produk dari hasil laut. Namun pada kenyataannya penerapan predikat Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng ini juga tidak luput dari beberapa kendala atau masalah, ditemukan bahwa predikat Desa Budaya Maritim yang didapat ini belum mampu dipahami dan dimengerti terkait arah budaya maritim oleh masyarakat setempat, terlihat juga adanya kebiasaan buruk masyarakat yakni membuang sampah di pesisir pantai yang mana dapat merusak eksistensi kelautan. Masih banyak hasil laut yang belum mendapat sentuhan pemasaran yang tepat, cepat dan memiliki basis yang luas. Persolan-persoalan di atas tentunya harus bisa diatasi oleh Pemerintah Kalurahan Tileng supaya keberadaan Peredikat Desa Budaya Maritim ini dapat terus terjaga.

Pada penilaian ini, penulis menggunakan konsep sinergitas yang bertujuan untuk mengetahui sinergi yang dilakukan aktor/aparat Pemerintah Desa dalam Membangun Desa Budaya Maritim yang ada di Kalurahan Tileng. Sinergitas merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Jika dilihat dari pengertian di atas konsep sinergitas pada sebuah pembangunan dapat terwujud bila ada interaksi dan kerja sama antara pihak-pihak tertentu. Pihak yang di maksud pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa dengan

Masyarakat. Terciptanya sinergitas yang baik menghasilkan komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. Sebagai tolak ukur dalam melakukan sinergitas harus adanya akuntabilitas, *feedback*, komunikasi dan koordinasi. Kondisi yang terjadi di Kalurahan Tileng terkait sinergitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng masih belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat pada komunikasi antara Pemerintah Kalurahan Tileng dan masyarakat Kalurahan Tileng terkait predikat desa budaya maritim masih belum terjalin dengan baik. Hal ini juga diperkuat dengan pengelolaan hasil laut, selama ini pada umumnya perekonomian hasil laut sudah bergerak untuk membuat produk misalnya abon tuna, padahal masih banyak hasil laut lainnya yang belum mendapat sentuhan pengolahan dan pemasaran yang tepat, cepat serta memiliki basis jaringan yang luas.

Berangkat dari persoalan atau fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim. Oleh karena itu, penulis mengajukan skripsi penelitian yang berjudul **“Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

Untuk melacak Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. penelitian ini dipandu oleh perspektif *Governing* sebagaimana yang diajarkan dalam Mazhab Timoho. Perspektif *Governing* digunakan karena penelitian ini berbicara tentang perbuatan dan aktivitas memerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Sinergitas Pemerintah Desa dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun desa budaya maritim?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan Sinergitas dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mendeskripsikan kendala Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun desa budaya maritim.

### 2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperkaya pengetahuan tentang upaya pemerintah desa untuk membangun dan mengembangkan desa budaya maritim.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menambah referensi terkait upaya dari pemerintah desa dalam penyelesaian kendala atau hambatan dalam membangun dan mengembangkan desa budaya maritim.

## **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada:



1. Hubungan Komunikasi dan Koordinasi antara stakeholders dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng.
2. Program dan realisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng untuk membangun dan mengembangkan Desa Budaya Maritim.
3. Kendala atau hambatan yang dihadapi Kalurahan Tileng dalam membangun dan mengembangkan Desa Budaya Maritim.

## **E. Literature Review**

Pada dasarnya, penelitian tentang pembangunan desa budaya maritim bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian-penelitian yang terdahulu telah berupaya untuk mengungkapkan tentang upaya pembangunan desa budaya maritim adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal Pendidikan dan konseling, yang dilakukan oleh Widiyanto Pudyono, Moeljadi, Adi Kusumaningrum, Windu Wahyu Wijaya, yang berjudul Peran Intelijen Guna Membangun Budaya Maritim Indonesia Sebagai Pilar Dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia. Volume 4 Nomor 2 tahun 2022. Tulisan ini berisi tentang pembangunan kembali budaya maritim di Indonesia yang dilakukan oleh intelijen maritim yang ada di Indonesia untuk membantu pemerintah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang di konsultasikan untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang keberadaan budaya maritim di Indonesia. Teori tersebut diantaranya teori tentang budaya, budaya maritim, pembentukan identitas, identitas nasional dan fungsi intelijen. Beberapa teori ini memungkinkan komunitas intelijen maritim untuk membangun kembali budaya maritim di Indonesia yang saat ini mulai memudar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas intelijen maritim dalam melaksanakan tugasnya untuk membangun kembali budaya maritim di Indonesia telah melakukan segala upaya deteksi dini dan peringatan dini dengan tujuan mencegah, menolak, dan memulihkan dari segala bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional. Dalam program pembangunan kembali budaya maritim yang ada di

Indonesia, komunitas intelijen maritim telah memberikan kontribusi yang besar melalui beberapa fungsi utamanya yakni, investigasi, kontra-intelijen dan psy-war. Dengan adanya kontribusi dari intelijen maritim ini sekiranya dapat menciptakan kepastian kondisi yang kondusif bagi budaya maritim di Indonesia sehingga dapat memperoleh kembali tempat dan eksistensinya dalam kehidupan berbangsa serta terwujudnya cita-cita menjadi poros maritim dunia.

Kedua, Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan yang dilakukan oleh Melinda A. Kambay, Djuwita R.R. Aling, Christian R Dien. Yang berjudul Eksistensi Budaya Maritim Kelompok Nelayan Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan *adaptation, goal attainment, integration* dan *latency* (AGIL). Untuk mendapatkan data primer dan sekunder menggunakan cara sensus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk budaya maritim pada kelompok Aurora dan alasan mempertahankan budaya maritim. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya asal usul dari anggota kelompok nelayan yaitu suku Sangihe sangat berpengaruh bagi kegiatan kemaritiman nelayan Aurora. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya maritim kelompok nelayan Aurora adalah budaya kebiasaan yang berasal dari suku nenek moyang anggota kelompok nelayan sebelum melaut. Warisan budaya kesenian seperti Tulude, Masamper, dan Ampa wayer yang dilakukan setiap tahun oleh kelompok nelayan Aurora merupakan bentuk warisan budaya yang selalu dijaga dan dipertahankan oleh kelompok nelayan Aurora.

Ketiga, Jurnal Media Komunikasi Geografi yang dilakukan oleh Indira Chairunnisa, Rijanta, Muhammad Baiquni, yang berjudul Pemahaman Budaya Maritim Masyarakat Pantai Depok Kabupaten Bantul. Volume 20 No 2 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui *in-depth interview* kepada masyarakat,

pemerintah dan akademisi. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi pemahaman budaya maritim yang ada di pantai Depok. Interaksi antara masyarakat dengan laut yang di dalamnya terdapat aktivitas yang mengarah kepada ekonomi pesisir, tradisi, strategi penghidupan dan kohesi sosial yang sudah memanfaatkan teknologi dengan dukungan penuh dari institusi merupakan teori budaya maritim yang ditemukan di pantai Depok. Sejarah masa lalu dan waktu lampau sangat mempengaruhi aktivitas budaya maritim di pantai Depok yang telah terbentuk dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam perkembangannya telah ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi masyarakat terkait budaya maritim di pantai Depok diantaranya kondisi fisik alamiah pantai Depok yang tidak menguntungkan, keterbatasan regenerasi nelayan dan keterbatasan infrastruktur seperti belum adanya Pelabuhan menjadikan nelayan sewaktu-waktu tidak dapat melaut.

Keempat, Jurnal Sosiologi yang dilakukan oleh Anggalih Bayu Muh. Kamim Ichlasul Amal, M. Rusmuk khandiq, yang berjudul Pemerintah sebagai Agen Perubahan sosial yang direncanakan: Studi Atas Pembangunan Kemaritiman Daerah Istimewa Yogyakarta (*Government as Agent of Planned Social Changes Studi Of Maritim Development in Special Region Of Yogyakarta*). Volume 2 No 2 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus yang dibatasi pada perubahan sosial yang direncanakan pada pengembangan sektor maritim Daerah Istimewa Yogyakarta pada RPJMD DIY 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan *purposive sampling*, Teknik dokumentasi terhadap laporan riset dan hasil kajian, serta obeservasi nonpartisipatif di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul. Penelitian ini mengkaji tentang peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai agen pembangunan yang menentukan perubahan fokus dari agraris ke maritim. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa melalui program-program pembangunan

yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Namun dalam penerapannya terdapat masalah atau persoalan yang dihadapi pemerintah yakni tidak dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat secara maksimal, persoalan lain muncul dari perubahan struktur rekayasa sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat maritim yang mengalami berbagai masalah diantaranya pemerintah tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat pesisir yang terkendala oleh kondisi geografis, banyaknya nelayan pendatang dari luar sehingga menyebabkan masyarakat pesisir tidak menjadikan nelayan sebagai profesi utama dan lebih memilih sektor agraris sebagai mata pencaharian utama.

Kelima, Jurnal Pena Pustaka: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Penelitian ini dilakukan oleh Sugianto, yang berjudul Optimalisasi Kemandirian Kelautan Dalam Mewujudkan Pembangunan Budaya Maritim Nasional. Volume 19 Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memaparkan secara mendalam mengenai pentingnya mewujudkan dan membangun sektor kelautan. Dijelaskan bahwa solusi yang tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keamanan rakyat serta kedalautan Indonesia adalah dengan menggunakan Kebijakan Kelautan Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah mewujudkan tatanan pemerintah dengan *grand desain* pembangunan nasional, dimana dapat terbangunnya senergritas dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan daerah sehingga dapat mewujudkan pembangunan kebijakan kelautan. Dalam penelitian ini dijelaskan juga bahwa, Pemerintah dapat mewujudkan kebijakan kelautan yang berlandaskan pada program Kebijakan Nasional Indonesia sesuai dengan tuntutan RPJMN periode 2015-2019.



Keenam, Jurnal Keamanan Maritim yang dilakukan oleh Ari Widodo, M. Adnan Madjid, Purwanto yang berjudul Pengaruh Teknologi Panel Surya Dan Budaya Maritim Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Maritim (Studi Kasus: Pulau Pasaran Provinsi Lampung). Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh teknologi panel surya dan budaya terhadap kesejahteraan masyarakat di Pulau Pasaran, Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa teknologi panel surya sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dibandingkan dengan teknologi tradisional, dimana peningkatan hasil tangkapan ikan menggunakan teknologi panel surya 2-3 kali lipat hasilnya dibandingkan dengan teknologi tradisional. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi nelayan sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maritim. Dalam penelitian ini dijelaskan juga bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau Pasaran dipengaruhi oleh budaya maritim, dimana budaya yang dimaksud dalam hal ini adalah cara penangkapan ikan yang digunakan oleh masyarakat pesisir dengan menggunakan teknologi panel surya memberikan hasil tangkapan sebesar 71,1%. Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan kuisisioner kepada nelayan pulau pasaran. Hasil dari kuisisioner tersebut menunjukkan rata-rata nelayan setuju untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk menangkap ikan dan mengganti mesin tradisional yang biasa mereka gunakan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi dan budaya memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat maritim di pulau Pasaran, Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Ketujuh, Jurnal Arkeologi yang dilakukan oleh Hari Suroto, Erlin N. I. Djani, yang berjudul Budaya Maritim di Pesisir Utara Papua (*Maritim Culture In The Papua North Coast*). Volume 10 Nomor 1 Tahun 2018. Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang

kebudayaan dan tradisi maritim di pantai utara Papua. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnoarkeologi dengan melakukan pengumpulan data, analisis data dan interpretasi data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk kebudayaan maritim yang di pantai utara Papua, diantaranya mata pencaharian hidup, pengetahuan tradisional terkait maritim, kearifan lokal dalam melestarikan sumberdaya maritim dan peralatan hidup. Penulis juga menjelaskan kearifan lokal di pantai utara Papua dalam mengatur, mengelola, memanfaatkan serta melestarikan sumberdaya laut dan pesisir adalah bagian dari tradisi maritim. Tradisi maritim di pantai utara papua juga dapat dilihat dari bentuk perahu dan dayung. Bentuk perahu dan dayung antara daerah pesisir, sungai dan danau berbeda. Perahu daerah pesisir memiliki cadik sebagai penyeimbang dengan ukuran perahu beragam sesuai dengan fungsinya sedangkan perahu yang digunakan di daerah sungai dan danau berbentuk seperti lesung.

Kedelapan, Jurnal Litigasi yang dilakukan oleh Tuti Marwati, yang berjudul Peran Hukum Dalam Pembangunan Budaya Maritim di Indonesia. Volume 19 Nomor 2 Tahun 2018. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk membahas bagaimana peran hukum membangun budaya maritim dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini memandang bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ditemukan bahwa, peran hukum dapat dianggap sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar dapat membangun budaya maritim melalui program-program dalam kebijakan pemerintah, Contohnya “gemar ikan” (gemar makan ikan). Peran hukum dalam program ini di buat untuk merespon adanya identitas masyarakat yang dapat berjalan bersamaan dengan peranan hukum dalam pembangunan kebudayaan maritim. Makna pembangunan hukum di sini memberikan kemajuan karena sifatnya selalu aktif dalam

memperbaharui hukum menuju ke arah yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Hukum juga di sini berusaha untuk mengadakan perubahan sosial dengan tujuan dapat membangun kembali budaya maritim.

Kesembilan, Jurnal Wawasan Sosial Budaya Maritim yang dilakukan oleh Tri Nadia Asrini, yang berjudul Pendidikan maritim membangun jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kembali pentingnya pendidikan maritim dalam pembangunan nasional Indonesia maritim. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pendidikan maritim merupakan pendidikan yang sangat penting guna mewujudkan poros maritim serta untuk memperluas pengetahuan mengenai pentingnya maritim kepada seluruh masyarakat Indonesia yang pada dasarnya Indonesia merupakan Negara maritim. Pendidikan maritim mencakup pendidikan mengenai pola perilaku dan cara hidup masyarakat suatu bangsa dalam pemanfaatan laut dan seluruh potensi kekayaan maritim baik itu yang ada di dalam, di atas, dan di sekitar laut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pendidikan maritim ini difokuskan pada pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar tanggung jawab untuk menjaga laut serta berperilaku dalam berbangsa dan bernegara dapat ditanamkan sejak dini. Teknik yang dapat digunakan untuk menarik minat para generasi muda untuk lebih semangat mempelajari budaya maritim ialah dengan cara melalui pengenalan-pengenalan tentang laut, tata cara berkehidupan ataupun tentang biota-biota laut dengan metode yang mengarah ke pembelajaran secara visual dan kinestetik yang dibalut dengan kreativitas peserta didik seperti dengan cara menggambar atau membuat dari kertas berwarna. Selain itu, untuk meningkatkan rasa cinta peserta didik terhadap laut diberikan penjelasan singkat mengenai manfaat laut untuk kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat ataupun dunia menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan menampilkan gambargambar keindahan laut Indonesia beserta ekosistem-ekosistem di dalamnya. Dalam mewujudkan Pendidikan

maritim masih banyak masalah yang harus dihadapi. Masalah utama utama yang paling mendasar dari terhambatnya perluasan Pendidikan maritim ini adalah masih belum banyak masyarakat yang merasa bahwa laut dijadikan sebagai pokok dari kegiatan mereka dan belum adanya sikap ingin mengetahui yang cukup besar mengenai potensi laut Indonesia. Masalah berikut adalah Kendala berikutnya adalah kurangnya pendidik atau tenaga ahli yang berwawasan di dunia kemaritiman sehingga proses belajar-mengajar budaya maritim terhambat karena kurangnya materi yang disampaikan kepada generasi muda.

Kesepuluh, Jurnal Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Mellisa Towadi, Apriyanto A.J Pauweni, Julius T. Mandjo, yang berjudul Desa Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah. Volume 1 No 2 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan penguatan kapasitas desa melalui pengelolaan sampah/limbah laut sebagai bentuk upaya ketahanan bahari desa Ponipingan. Penelitian ini disusun secara normatif berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu adanya optimalisasi peran kapasitas desa dari masyarakat hingga perangkat desa. Desa pesisir berbeda dengan desa lainnya, dimana desa pesisir ini memiliki tipologi wilayah yang unik sehingga perlu memiliki ketahanan yang kuat dari berbagai aspek seperti aspek pencegahan alam, ketahanan lingkungan serta ketahanan sosial, budaya dan ekonomi. Ketahanan ini dapat dilakukan dengan program seperti meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah dan limbah laut. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih tangguh, bersih dan sehat tentunya perlu ada kerja sama antara stakeholders baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa Ponipingan dan seluruh masyarakat desa ponipingan. Ada beberapa hal yang mendukung upaya kemandirian masyarakat Ponipingan dalam mengembangkan

desanya menjadi “Desa Mandiri Maritim” seperti memperkuat sumberdaya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia,

Penelitian-penelitian diatas memiliki relevansi dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun persamaan dalam penelitian diatas yaitu penelitian dahulu juga sama-sama mencoba menjelaskan pembangunan budaya maritim. Selain itu peneliti-peneliti terdahulu juga mencoba menelusuri kebijakan pemerintah terkait mewujudkan budaya maritim. Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian ini tentang Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Konsep *Governing***

Stephen A. Cook (2007) dalam bukunya yang berjudul *Ruling But Not Governing* (mengusai tapi tidak memerintah) mengemukakan perbedaan antara memerintah (*governing*) dengan mengusai (*ruling*). Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa kekuatan militer sangat mendominasi segala lini kehidupan masyarakat Mesir namun tidak memerintah (*governing*) dalam artian tidak mengatur dan mengurus. Dalam hal ini, dominasi kekuatan militer hanya berhenti pada tataran mengusai (*ruling*), dengan kata lain *ruling* dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah.

Terdapat perbedaan antara *ruling* dan *governing*. *Ruling* memiliki makna mengusai yang di dalamnya mengandung unsur dominasi serta dapat dilakukan oleh siapapun termasuk tentara dan non pemerintah. Sedangkan *governing* melekat pada otoritas atau pemerintah yang memiliki hak dan wewenang untuk memerintah dan menyelenggarakan pemerintahan. Memerintah di sini memiliki pengertian yaitu

penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Atau dengan kata lain memerintah adalah menjalankan pemerintahan.

*Governing* diambil dari tradisi Belanda yang membahas mengenai mengatur dan mengurus. Makna yang dimaksud dari mengatur dan mengurus adalah perbuatan hukum dan perbuatan administrasi dan agak mengabaikan perbuatan politik. Mengatur berarti membuat keputusan terutama membuat hukum (*law making*), mengurus (*bestuur*) dan mengelola. Ada beberapa fungsi dari konsep ini diantaranya mengarahkan (*steering*), menata (*ordering*), dan menegusai (*ruling*).

*Governing* memiliki pengertian mengatur dan mengurus ekonomi, politik, sosial dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi pemerintah di sini sebagai *protecting* atau melindungi artinya melindungi rakyat jelata dari rampasan elit ekonomi dan menyelesaikan sengketa bukan sekedar *promoting*. *Governing* ini mengandung berbagai macam proses diantaranya proses politik, hukum dan administrasi. Hal ini di karenakan politik diartikan sebagai sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum serta administrasi diartikan sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut. (Cook, 2007)

Elinor Ostrom dalam bukunya yang berjudul *Governing Common Pool Resource* (Sumber Daya Milik Bersama) mengemukakan bahwa semua orang bisa memanfaatkan tetapi tidak bisa memiliki. Jika hanya dikelola oleh pemerintah atau segelintir komunitas akan memunculkan permasalahan, sehingga *Ostrom* menawarkan alternatif dengan menggunakan institusi kolaborasi yang berbasis pada komunitas lokal seperti pengalaman yang terjadi di Amerika Utara dalam pengolahan air dan danau yang dapat mengurangi permasalahan baik itu sengketa atau eksklusi, kemiskinan, dan degradasi lingkungan. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia dalam pengelolaan Sumber

Daya Alam adalah dengan terbentuknya komunitas secara permanen seperti masyarakat adat, diluar dari itu pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis komunitas baik itu kelompok masyarakat hasil bentukan seperti oleh DISPAR atau kementerian lainnya dapat menimbulkan masalah ataupun tragedi.

*Governing* adalah arena kontestasi sehingga sangat diperlukan pemerintah yang berdaulat, kuat, dan demokratis serta tidak diintervensi oleh elit atau pihak lainnya tetapi memilih untuk lebih tegak lurus. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Terdapat beberapa makna dari mengatur dan mengurus, diantaranya:

- a. Mengeluarkan dan menjalankan peraturan
- b. Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul
- c. Memuntuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat.
- d. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan maupun merawat *public goods* yang telah diatur. Bentuk konkrit mengurus dapat dilihat dari implementasi pembangunan maupun pelayanan public.

Konsep mengurus berarti mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa atau bisa juga disebut sebagai hak kelola desa. Konsep mengurus tidak mesti merupakan konsekuensi dari kuasa mengatur atas hak milik walaupun desa memiliki kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap asset atau hak

milik desa. Jika desa berwenang mengurus, maka dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur.

Kewenangan mengatur dan mengurus pada dasarnya ditunjukkan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ada tiga fungsi urusan pemerintah yang dijalankan oleh pemerintahan diantaranya: pertama, pengaturan (*public regulation*). Pengaturan ini diartikan sebagai kegiatan mengatur (baik itu dalam hal membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan maupun larangan yang harus dihindari) yang berkaitan dengan pemanfaatan barang-barang publik, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, air, udara, uang dan sebagainya. Kedua, pelayanan publik (*public goods*), dan yang ketiga pemberdayaan masyarakat (*empowerment*), pemberdayaan ini diartikan sebagai fungsi pemerintah untuk memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelola barang-barang publik serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki. (Ostrom, 2015)

Urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sudah diatur dan diurus oleh pemerintah. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Sektorial lainnya menjelaskan bahwa urusan pemerintahan sudah dibagi habis kepada pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota. Terdapat perbedaan antara urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat walaupun kepentingan masyarakat setempat sebenarnya tercakup dalam urusan pemerintahan, perbedaan keduanya dapat dilihat pada urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk kepentingan masyarakat setempat diartikan sebagai kebutuhan semua masyarakat yang terkait dengan penghidupan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul dari



pengembangan kapasitas masyarakat, beskala dan bersifat setempat (lokal) serta terkadang tidak tercakup dalam peraturan dan kebijakan pemerintah.

Dalam Eko (2014: 128) menjelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran desa adalah bagian dari susunan kelembagaan untuk kemandirian desa. Dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran menjadi jenis wewenang desa, melainkan secara terprinci keduanya adalah kewenangan melekat (*atributif*) desa. Makna perencanaan lebih banyak mengusulkan ke atas daripada mengambil keputusan tingkat lokal, walaupun sebelumnya perencanaan desa merupakan bagian dari perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan desa telah mengalami perubahan dari sebelumnya dimana sekarang perencanaan desa adalah *village self planning* yang berdiri sendiri dan diputuskan secara mandiri oleh desa. Perencanaan dan penganggaran desa harus saling mengacu supaya terjadi *in-terlinkage* dan terkonsolidasi dengan baik.

Jargon “satu desa, satu rencana dan satu anggaran” telah membangkitkan semangat dan perspektif yang menonjol dalam Undang-Undang Desa. Ada dua hal yang dimaksudkan dari jargon di atas: pertama, desa memiliki hak dan kewenangan untuk keputusan perencanaan dan penganggaran secara mandiri, sesuai dengan konteks dan kepentingan dari masyarakat setempat. Kedua, membendung imposisi dan pengurangan proyek masuk desa yang dari K/L (Kementrian/Lembaga) maupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang selama ini menjadikan desa sebagai pasar perencanaan dan penganggaran (Eko, 2014: 128).

Perencanaan desa sebagai bentuk keputusan lokal itu merupakan jantung kemandirian desa. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam perencanaan ialah alokasi anggaran, terlebih khusus Alokasi Dana Desa (ADD), dimana tidak hanya buat

membayai konsumsi pemerintah desa, bukan pula hanya buat membangun prasarana fisik desa, melainkan alokasi untuk investasi manusia serta pengembangan ekonomi lokal dimana berorientasi pada penanggulangan kemiskinan.

Perencanaan serta penganggaran desa itu menjadi arena untuk membangun dan mengembangkan makna identitas serta eksistensi desa, sekaligus buat persemaian demokrasi lokal. Identitas serta eksistensi desa itu mampu diwujudkan berbagai bentuk mulai dari pemetaan sosial sampai pengambilan keputusan secara kolektif, sebagai akibatnya hal ini merintis apa yang pada sebut menjadi tradisi berdesa. Desa menjadi identitas serta arena kolektif bagi warga.

Kessa (2015: 48), dalam buku *Perencanaan Pembangunan Desa*, mengemukakan bahwasannya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melingkupi pembangunan desa berskala lokal desa serta pembangunan daerah atau sektoral yang masuk ke desa. Swakelola desa, kerjasama yang dibangun oleh desa baik kerjasama antar desa, maupun kerja sama dengan pihak ketiga dapat membangkitkan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah provinsi, terlebih khusus pembangunan yang bersumber dari program sektoral atau program daerah. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program sektor atau program daerah melalui mekanisme pembahasan dan tentunya harus disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dengan demikian pelaksanaan program yang dibuat oleh perangkat desa maupun unsur masyarakat desa harus sejalan dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa rumusan Konsep *Governing* mengacu pada perbuatan dan keputusan Pemerintah dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat. Konsep *Governing* dalam pelaksanaan penelitian ini mengacu pada perbuatan dan aktivitas Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun dan mengembangkan Desa Budaya Maritim. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam membangun Desa Budaya Maritim perlu adanya pertanggungjawaban dari Pemerintah Kalurahan Tileng untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut agar proses pembangunan dan pengembangan Desa Budaya Maritim ini tetap stabil. Untuk bisa membangun dan mengembangkan Desa Budaya Maritim yang stabil tentunya pemerintah Kalurahan Tileng harus merencanakan dan menjalankan program yang dapat mendukung pembangunan dan perkembangan Desa Budaya Maritim agar dapat berguna bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

## **2. Sinergitas**

Sinergitas atau sinergi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *synergy*, yang memiliki arti kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Istilah sinergitas merupakan kegiatan kelompok atau individu-individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda untuk berkerja sama atau menyesuaikan kinerja untuk mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Hampden-Turner dalam irwanda (2016:146-156), kegiatan sinergi adalah suatu bentuk tindakan yang melibatkan semua aktifitas, kegiatan tersebut akan bekerja sama sehingga mencapai atau menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya Hampden-Turner mengatakan bahwa, sinergi merupakan hasil yang datang dari relasi atau kerja sama dialogik antara berbagai sumber yang berbeda dan berasal dari suatu proses mengumpulkan berbagai macam pengetahuan. Selanjutnya, Hartono mengartikan sinergi sebagai suatu gagasan baru yang muncul atau terbentuk melalui gagasan berbagai macam gagasan yang diajukan oleh berbagai pihak sehingga menghasilkan ide (kebijakan) yang baru.

Menurut Najianti dalam Rahmawati et al (2014: 614-647), sinergitas merupakan kombinasi unsur/bagian yang dapat menghasilkan ide/gagasan lebih baik dan besar saat di bangun dengan tepat bersama *stakeholders* yang terlibat di dalamnya. Tujuan dari sinergitas ini adalah membangun masyarakat melalui kerja sama yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya serta didasari pada pemikiran-pemikiran yang telah di pertimbangkan secara logis, terbuka dan demokratis. Pernyataan di atas diperkuat oleh pemikiran Silalahi, yang menegaskan bahwa koordinasi sangat di butukan dalam sinergi supaya dapat menyesuaikan kegiatan, baik itu dilakukan oleh individu-individu maupun unit-unit dalam suatu kelompok supaya mendapat arah yang sama untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam pelaksanaan sinergitas terdapat indikator untuk mencapai jaminan kesehatan semesta. Dengan demikian hadirnya sinergitas ini dapat memberikan dampak yang baik bagi hubungan antar aktor sehingga dapat mempermudah pencapaian kepentingan bersama yang ingin diwujudkan. Nijianti, menjelaskan ada dua cara agar mencapai sinergitas, yakni:

1. Komunikasi, Sofyani dan Garniwa (2007), menjelaskan bahwa komunikasi terdapat dua bagian, komunikasi yang bersumber dengan awalnya menyatakan bahwa kegiatan dimana seorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan tanggapan. Setelah itu komunikasi yang berorientas pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.
2. Koordinasi, Silalahi (2011) menjelaskan untuk tercapainya sinergitas, sangat diperlukan koordinasi antar aktor. Ia menegaskan bahwa koordinasi merupakan integrasi dari berbagai kegiatan individu-individu maupun unit-

unit dalam satu usaha bersama yakni berkerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Sependapat dengan Nijianti, Triana Rahmawati dkk (2014) menjelaskan sinergi dapat dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi. Sinergi dapat tercapai jika terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara aktor. Sejalan dengan pemikiran di atas, Mulyanan dalam Irwanda (2016) mengatakan sinergitas dapat dicapai melalui komunikasi dan koordinasi. Mulyana menegaskan, koordinasi sangat dibutuhkan terkait hubungan antar *Stakeholders* baik secara *vertical*, *horizontal*, komando, koordinasi serta hubungan kemitraan. Sedangkan komunikasi merupakan pertukaran informasi antar berbagai pihak.

Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa sinergitas merupakan sebuah kondisi yang melibatkan serta menghubungkan berbagai aktor untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Agar Tercapainya tujuan tersebut diperlukan sinergitas yang di dalamnya terdapat atau telah tercantum koordinasi dan komunikasi sebagai langkah untuk mempermudah tercapainya tujuan tersebut.

### **3. Pemerintah Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan desa adat maupun yang disebut dengan nama lain kemudian disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan hak asal usul, dan hak tradisiona yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan hal ini dapat diketahui kesatuan masyarakat hukum, segala urusan yang menyangkut urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang berkedudukan sebagai *leadership* yang menempati langsung di desa. Hal ini tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 dan 3 yang berikhtiar bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah desa merupakan kepala desa yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Diketahui ada beberapa tugas yang harus dijalankan oleh kepala desa, diantaranya: sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis bertugas membantu menjalankan tugas dan wewenang dari kepala desa.

Dalam rangka memahami konsep pemerintahan desa, maka penting untuk mengarahkan perhatian pada konsep pemerintah. Sutoro Eko (2021), menjelaskan bahwa pemerintah (*government*) adalah *supreme authority* dalam arena pemerintahan seperti negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, birokrasi, negara atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama Parlemen.

Diketahui salah satu elemen penting dari negara adalah pemerintah, dimana pemerintah diartikan sebagai aktor atau institusi sebagai penyelenggara negara. Hal yang paling krusial yang harus diketahui bahwa pemerintah dan negara adalah dua institusi yang berbeda. Pemerintah memiliki sifat dinamis, dan dapat berubah secara berkala sedangkan negara bersifat tetap dan permanen. Pemerintah dapat dipahami sebagai arena yang berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan. Pemerintah dalam negara modern dipahami sebagai otoritas tertinggi yang bertugas menyelenggarakan, memerintah, mengurus dan mengatur negara termasuk untuk menggapai tujuan negara yang diamanatkan dalam konstitusi.

Lebih lanjut, Sutoro Eko (2021) menjelaskan beberapa makna tentang pemerintah. Pertama, pemerintah sebagai subjek. Jika mengikuti logika idealisme konstitusional-demokrasi, tentunya yang memerintah ialah pemerintah dengan parlemen yang hadir sebagai pemegang institusi kedalautan rakyat. Akan tetapi, realisme memandang yang memerintah tidak harus pemerintah, hal ini dikarenakan secara *de facto* terdapat banyak subjek yang memerintah contohnya negara, birokrat, konsultan, teknokrat, serta perangkat. Pemerintah yang berperan sebagai subjek mempunyai arti idealisme filosofis yang dalam. Seperti yang disampaikan Karl Polanyi (1994), bahwa pemerintah dibentuk agar kebutuhan distribusi serta proteksi, khususnya perlindungan terhadap masyarakat-masyarakat lemah dari kekuasaan kaum elite. Pemerintah berkerja supaya membebaskan masyarakat sebagai pemilik negara karena pemerintah dibentuk oleh rakyat.

Kedua, pemerintah dan objek serta predikat. Selain berkaitan dengan subjek, pemerintah juga berkaitan dengan objek serta predikat seperti kepada siapa dan apa yang diperintah. Maksud dari kata “siapa” yang diperintah ialah negara, warga serta masyarakat. Selanjutnya kata “dimana” diartikan sebagai penyebutan tempat maupun arena bagi proses memerintah pada berbagai bentuk baik itu dalam dunia, negara, daerah, desa serta komunitas. Sedangkan yang dimaksudkan dari kata “apa” berbicara tentang hajat hidup orang banyak yang mengandung hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan oknum-oknum berkepentingan, tidak hanya membicarakan Lembaga perkantoran dan Lembaga administrasi maupun pagar kantor Bupati. Salah satu contohnya adalah membicarakan terkait persoalan beras tentunya akan mempetemukan banyak oknum seperti petani, pedagang, tengkulak serta pedagang.

Ketiga, pemerintah dalam masyarakat (*local self government*). Pada dasarnya pemerintah dalam masyarakat yang berkedaulatan rakyat tidak hanya

menyelenggarakan negara tetapi memerintah negara supaya negara hadir untuk memberikan dan mendukung distribusi serta proteksi bagi masyarakat serta memaksa masyarakat supaya patuh pada hukum. Pemerintah mungkin lebih efektif jika mendapat hasil persetujuan yang bersyarat dengan kalimat lain setidaknya dilakukan secara sukarela (Margaret Levi, 2006).

Pemerintah dibentuk dengan politik oleh masyarakat, rakyat merupakan konsep politik. Dalam masyarakat pemerintah adalah milik rakyat. Warga merupakan subjek hukum yang mempunyai kesamaan hak dan kewajiban terhadap negara. Dengan demikian negara adalah milik warga. Negara mempunyai hubungan dengan sentralisasi, birokratisasi, unifikasi serta koersi, negara tidak memiliki hubungan dengan demokrasi serta bersifat statis. Demokrasi menumbuhkan rasa dinamis bagi pemerintah dalam melaksanakan perilaku atau tindakan politik serta membuat hukum karena demokrasi berada pada rana pemerintahan. Hukum merupakan ekspresi kehendak politik serta otot besar pemerintah dalam memerintah negara, ini menggambarkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan.

#### **4. Budaya Maritim**

Sebelum membahas tentang budaya maritim, baiknya membahas apa makna atau arti dari budaya maritim itu sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan budaya sebagai pikiran, akal budi, serta kebiasaan masyarakat yang sulit untuk diubah. Lebih lanjut, Koentjaraningrat menjelaskan bahwa budaya adalah segala daya serta aktifitas manusia untuk mengubah dan mengelolah alam semesta. Pengertian budaya juga di sampaikan oleh Edward Burnett Tylor, ia mengartikan budaya sebagai keseluruhan yang kompleks mencakup pengetahuan, kepercayaan, hukum, kesenian, moral, adat istiadat serta kemampuan lain yang dimiliki individu sebagai bagian dari masyarakat. Sedangkan Pasudi Suparlan mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan



pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk memahami dan mengetahui pengalaman serta lingkungan yang sedang di alami. (Tylor, 1988).

Maritim dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan laut dan pelayaran. Secara etimologis, kata maritim berasal dari Bahasa Latin yakni *maritimus* atau *mare* yang berarti laut. Atas dasar tersebut, kata maritm merupakan suatu bentuk aktifitas maupun tindakan yang berkaitan dan dilakukan di laut, misalnya pelayaran yang memiliki tujuan baik itu berdagang maupun mencari ikan. Jadi, budaya maritim jika dilihat dari uraian di atas adalah keseluruhan ide maupun gagasan yang mampu menumbuhkan prilaku maupun tindakan yang menjadi milik bersama bagi yang hidup dan tinggal dekat laut. Definisi ini tertuju pada masyarakat yang hidup di daerah pesisir yang memiliki kultur melaut dan selalu bersinggungan dengan laut.

Kebudayaan maritim bisa juga sebut dengan kebudayaan kelautan. Menurut Marzani, (2003) dalam Baiquni (2014) budaya maritim sebagai paradigma kepulauan yang selanjutnya diterjemahkan merupakan cara pandang sebuah teori atau praktis yang berdasarkan pada kemajemukan masyarakat, keberagaman ekosistem serta kompleksitas wilayah kepulauan. Paradigma kepulauan memiliki keterkaitan dengan inspirasi dan ilham agar menemukan jati diri teori, konteks historis, pergumulan masalah pembangunan dan prakteknya serta mengajukan kerangka paradigma yang baru. Selanjutnya dijelaskan bahwa paradigma kepulauan ditempatkan pada konteks wilayah kepulauan yang dapat dicari dari historis dan sejarah peradaban nusantara, pasang surut pertumbuhan serta perkembangan peradaban nusantara selalu dinamis dengan pusat-pusat kekurangan yang berpindah dan mengalami perubahan dari satu pulau menuju pulau lainnya.

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Wijaya (2015) dalam Siswanto (2018), menurutnya budaya maritim merupakan salah satu budaya yang mengutamakan keterampilan, keberanian dan kemampuan dalam mengatasi dan menghadapi berbagai macam persolan, budaya yang pandai dalam membaca tanda-tanda zaman dan kehidupan. Budaya maritim dipandang sebagai budaya yang rela berkorban demi kepentingan masyarakat umum baik dalam kondisi yang baik maupun sulit dengan keluhuran budi dan kearifan serta budaya melayani yang mendahulukan kepentingan rakyat. Setiadi (2006), menjelaskan bahwa wujud kebudayaan maritim merupakan suatu sistem dari suatu ide dan konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola.

Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep budaya maritim merupakan budaya yang dipengaruhi oleh laut. Laut sebagai sarana transportasi, laut sebagai sarana ekonomi, serta laut sebagai sarana tradisi. Kegiatan dan kehidupan masyarakat sangat bergantung dan tumbuh dari laut. Kebudayaan maritim termasuk dalam kebudayaan, hal ini dikarenakan kebudayaan maritim muncul dari bentuk dan hasil pemikiran yang berasal dari masyarakat yang hidup di wilayah perairan dan pesisir pantai.

## **5. Desa Budaya Maritim**

Sebelum membahas tentang konsep desa budaya maritim, baiknya kita membahas dulu konsep desa maritim dan konsep budaya maritim. Desa-desa yang terletak di wilayah atau daerah pesisir pantai yang memiliki batas langsung dengan laut disebut sebagai desa maritim. Banyaknya pulau serta memiliki 70% wilayah laut yang membuat banyak desa terletak di daerah pesisir pantai. Tentunya dengan keadaan alam serta letak wilayah tersebut mengakibatkan sebagian besar penduduk yang berada di

wilayah desa pesisir memilih untuk menggantungkan hidupnya pada laut dengan kata lain banyak masyarakat yang memilih bermatapencaharian sebagai nelayan.

Sedangkan konsep budaya maritim tidak dapat terlepas dari arti kebudayaan, dimana budaya maritim diartikan sebagai salah satu bentuk artikulasi dari sebuah kebudayaan. Suparto (2001) mengatakan kebudayaan berasal dari kata *budhi* (tunggal) atau *budhaya* (majemuk) yang berarti hasil pemikiran atau akal manusia. Sedangkan Koentjaraningrat (Supartono, 2001), mengatakan kebudayaan merupakan seluruh ide atau gagasan serta karya manusia yang harus bisa dibiasakan melalui belajar dan keseluruhan atas hasil budi pekertinya. Kebudayaan dapat juga diartikan sebagai bentuk dari kehidupan setiap individu maupun kelompok. Lebih lanjut Supartono (2001) menjelaskan terdapat beberapa wujud dari kebudayaan di antaranya: sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya, sebagai bentuk kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, sebagai benda hasil-hasil karya manusia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan kebudayaan maritim adalah sebuah bagian dari kebudayaan, dimana budaya maritim ini muncul atas dasar hasil pemikiran masyarakat di wilayah perairan dan pesisir pantai.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, konsep Desa Budaya Maritim merupakan desa yang berada di wilayah pesisir pantai dimana masyarakat di dalamnya memiliki keterkaitan dengan laut yang sudah dijadikan kebiasaan. Dimana Perilaku hidup dan tata cara manusia sebagai masyarakat suatu desa yang berada di pesisir sangat bergantung pada laut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat khususnya pada bidang perekonomian baik untuk saat ini maupun untuk ke depannya dengan cara memanfaatkan seluruh sumber daya dan potensi kekayaan maritim yang berada di sekitar laut serta terus menggali dan mengembangkan ide atau gagasan baik itu

pengetahuan, sistem norma sosial dan teknologi yang dapat membantu mendukung kemajuan budaya maritim ini.

Desa budaya maritim yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah desa yang berada di wilayah pesisir pantai dimana desa tersebut di pilih melalui kajian ekonomi, pemetaan wilayah serta memiliki sumberdaya yang sangat potensial untuk di kembangkan khususnya dibidang maritim. Konsep Desa Budaya Maritim di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat dikatakan sebagai gagasan baru yang menyiratkan adanya perunahan pola pikir dan paradigma dalam masyarakat yaitu menuju budaya maritim dengan menjadikan potensi kemaritiman sebagai halaman depan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep Desa Budaya Maritim ini mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis budaya maritim dengan menjaga ekosistem laut yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di wilayah pesisir. Dengan adanya predikat Desa Budaya Maritim yang diberikan kepada Desa memberikan peluang kepada pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memanfaatkan, menggali dan mengembangkan potensi kekayaan maritim yang berguna memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian masyarakat saat ini dan masa yang akan datang.

#### **6. Payung Hukum Desa Budaya Maritim Daerah Istimewah Yogyakarta**

Program Kalurahan atau Desa budaya maritim yang di terapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan gagasan baru dari visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X telah menjadikan laut sebagai halaman depan, di mana ada pergeseran dari among tani ke dagang layar dengan kata lain arah pembangunan akan digerakan menuju orientasi kemaritiman. Program desa budaya maritim ini menyiratkan adanya perunahan pola pikir dan paradigma dalam masyarakat

yaitu menuju budaya maritim dengan menjadikan potensi kemaritiman sebagai halaman depan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Program desa budaya maritim ini didasari oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan. Program desa budaya maritim ini sudah berjalan sejak dimualinya pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana pada tahun 2021. Program ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan.

Dalam Peraturan Gubernur ini disebutkan dalam Pasal 6 terdapat 11 program dan kegiatan yang menjadi kebijakan strategis Gubernur DIY dan dibiayai oleh BKK Dana Keistimewaan, salah satunya adalah budaya maritim. BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan kepada pemerintah kalurahan diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam urusan keistimewaan.

Dalam hal ini dana yang dialokasikan Pemerintah Kalurahan Tileng dalam pembangunan budaya maritim bersumber dari BKK Dana Keistimewaan. Berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan Dana BKK Dana Keistimewaan Tahap II Tahun 2022 yang dirilis oleh Pemerintah Kalurahan Tileng, diketahui bahwa penerimaan BKK Dana Keistimewaan dari Rekening Kas Umum Daerah berlangsung dalam 2 tahap. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah Tahap I sebesar Rp. 346.443.000. Sedangkan penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah Tahap II adalah sebesar Rp.

403.557.000. Jadi, total BKK Dana Keistimewaan yang diterima Kalurahan Tileng dari Rekening Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp. 750.000.000.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif non positivisme. Pendekatan interpretif non postivisme merupakan upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti dan cenderung bersifat analisis. Secara umum, pendekatan ini merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dan terperinci. Proses dan makna prespektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. (molong 2002).

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan hanya menggambarkan mengenai suatu gejala, keadaan atau fenomena tertentu apa adanya (Mukhtar, 2003:15). Selain itu, penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena hasil penelitian yang dipaparkan bersifat apa adanya. Jadi, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan secara kualitatif, tidak menggunakan besaran angka melainkan kata-kata dan hasilnya dipaparkan atau dideskripsikan apa adanya (Mukhtar 2003: 15).

Sesuai dengan uraian di atas, pada penelitian ini, penulis mencoba menggali informasi dan menggambarkan kaadaan atau fenomena dengan menggunakan kata-kata mengenai pembangunan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng dengan melakukan pendekatan ke orang yang akan diteliti.

### **2. Unit Analisis**

Unit analisis diartikan sebagai suatu yang memiliki hubungan dengan fokus atau komponen yang akan diliti. Definisi lain tentang unit analisis adalah satuan tertentu

yang di perhitungkan sebagai subjek penelitian. Tujuan dari unit analisis adalah supaya validitas serta reliabilitas penelitian bisa terjaga. Unit analisis dalam penelitian harus sesuai dengan fokus penelitiannya, bisa berupa benda, waktu, individu, kelompok maupun wilayah. Terdapat unit analisis dalam penelitian ini, yakni:

a. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Objek penelitian ini yaitu pembangunan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah Teknik penentuan informasi yang didasarkan pada tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data sesuai dengan permasalahan yang di teliti. Subjek penelitian ini adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Tileng, BPKal dan Masyarakat Kalurahan Tileng.

Sebelum melakukan analisis data berdasarkan hasil penelitian, terlebih dahulu menelaah mengenai informan yang akan ditinjau dari jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Data yang penyusun sajikan adalah hasil penelitian lapangan yang di lakukan kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat Kalurahan Tileng. Dalam hal ini, data yang dikumpul oleh peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive* dimana mampu memberikan data

sesuai tentang Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim. Pemilihan informan dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti mendapat data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti sehingga data yang diambil benar-benar dapat mewakili.

Terdapat 12 informan yang terlibat dalam penelitian ini mulai dari aktor pemerintah desa, Aktor BPKal, Dukuh, dan masyarakat mulai dari nelayan, pedagang, pengolah hasil laut dan pedagang hasil laut. Setiap informan diwawancarai sesuai data yang dibutuhkan oleh penyusun.

**Tabel 1.1**

**Data Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Keterangan/pekerjaan
1	Suwardi	Laki-laki	54	S1	Lurah
2	Wagito	Laki-laki	53	S1	Ketua BPKal
3	Edi	Laki-laki	52	S1	Carik
4	Bondan	Laki-laki	38	S1	Kaur tata laksana
5	Dwi Budi Hartono	Laki-laki	35	S1	Anggota BPKal
6	Sutikno	Laki-laki	51	SLTA	Dukuh sentul
7	Sujarwo	Laki-laki	50	SLTA	Dukuh teken
8	Jamal	Laki-laki	54	SLTA	Padagang hasil laut
9	Mojito	Laki-laki	40	SLTA	Nelayan
10	Lusi	Perempuan	36	SLTA	Pedagang ikan
11	Yuni	Perempuan	38	SLTA	Ketua kelompok pengolah hasila laut
12	Wida	Perempuan	42	SLTA	Anggota kelompok pengolah hasila laut

*Sumber: Hasil Wawancara Peneliti*

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### a. Observasi (pengamatan)

Widoyoko (2014:46), mengartikan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang komponen-komponen yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Nawawi dan Martini (1992: 74) sependapat dengan Widoyoko, menurutnya observasi adalah pengamatan serta pencatatan secara sistematis tentang komponen-komponen yang nampak dalam suatu gejala pada objek.

Peneliti melakukan observasi di Kalurahan Tileng untuk menyajikan gambaran realistic tentang perilaku atau kejadian tentang Desa Budaya Maritim, untuk menjawab pertanyaan bagaimana pembangunan serta kendala atau persoalan yang dihadapi dalam membangun Desa Budaya Maritim, membantu mengartikan perilaku manusia (Pemerintah Desa) dalam membangun serta mengatasi persoalan terkait pembangunan Desa Budaya Maritim, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu atau mengetahui secara gambaran umum terkait fenomena yang terjadi dalam pembangunan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng.

Melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian (Nugrahani, 2014:132). Ratcliff menyatakan bahwa ada beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Bentuk obsevasi yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini, peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pendekatan partisipasi, melihat, mendengar, dan mencermati objek penelitian yang berhubungan dengan pembangunan desa budaya maritim.

Pada penelitian ini, penulis akan mengamati: kinerja Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun Desa Budaya Maritim, Hubungan Masyarakat dan Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun Desa Budaya Maritim, Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat serta Kedala yang dihadapi pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun Desa Budaya Maritim.

Sejauh ini yang sudah dilakukan peneliti dalam melakukan observasi adalah mengamati secara langsung ke lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dan juga masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa budaya maritim. Di sisi lain peneliti juga mengamati serta mengunjungi langsung infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kalurahan Tileng untuk mendukung lajunya pembangunan budaya maritim di Kalurahan Tileng. Dalam pelaksanaan observasi peneliti mencoba menjalin relasi dengan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengamati dan mengenal kegiatan yang sudah maupun sedang dilakukan terkait dengan pembangunan budaya maritim. Pengamatan secara langsung yang peneliti lakukan kepada masyarakat serta lingkungan sekitar bertujuan agar semua elemen yang ada dapat membantu memberikan informasi atau menunjukkan data-data yang dibutuhkan serta agar dapat mengetahui masyarakat

mana yang dapat dijadikan sebagai informan yang dapat memberikan data dan informasi yang sesuai dengan pembangunan budaya maritim di Kalurahan Tileng.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti tersebut ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan oleh informan terkait dengan penelitian (Meolong, 2003: 34).

Dalam hal ini, peneliti melakukan interaksi dengan subjek penelitian dengan melakukan komunikasi langsung agar memperoleh data dan keterangan yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan dari pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul.

Dalam sesi wawancara penulis akan menanyakan seputaran Pembangunan Desa Budaya Maritim kepada narasumber, pertanyaan yang di ajukan kepada narasumber berbeda-beda:

1. Garis besar pertanyaan kepada Lurah, dan Pamong Kalurahan Tileng

Pertanyaan yang diajukan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan Tileng secara garis besar berkaitan dengan Bagaimana Sinergitas Pemerintah Desa dalam pembangunan desa maritim, kebijakan apa saja yang sudah dibuat untuk mendukung lajunya pembangunan Desa Budaya Maritim, sejauh ini apa saja yang sudah dibangun, kendala apa saja dalam pembangunan Desa Maritim, apakah ada melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan lainnya terkait

dengan pembangunan Desa Budaya Maritim, apa saja potensi yang dapat mendorong terciptanya pembangunan Desa Budaya Maritim.

2. Garis besar pertanyaan kepada BPKal

Secara garis besar pertanyaan akan diajukan kepada BPKal yakni: sejauh mana pandangan BPKal terkait pembangunan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, apakah ada aspirasi masyarakat terkait Pembangunan Desa Budaya Maritim, apakah BPKal ikut serta dalam mengontrol pembangunan Desa Budaya Maritim, bagaimana komunikasi dan koordinasi Pemerintah Kalurahan Tileng dengan masyarakat terkait pembangunan Desa Budaya Maritim.

3. Garis besar pertanyaan kepada Dukuh, Yakni:

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, Sepengetahuan Bapak/Ibu Langkah apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun Budaya Maritim, bagaimana keterlibatan masyarakat padukuhan dalam membangun Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, apakah dengan hadirnya Predikat Desa Budaya Maritim ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat khususnya terkait ekonomi masyarakat.

4. Garis besar pertanyaan kepada masyarakat, yakni:

Bagaimana masyarakat memandang pembangunan Desa Maritim di Kalurahan Tileng, apakah pembangunan terkait Desa Maritim ini sejalan dengan harapan dari masyarakat, apa harapan masyarakat dengan adanya pembangunan Desa Budaya Maritim ini, apakah masyarakat ikut serta dalam pembangunan Desa Budaya Maritim ini, apakah dengan hadirnya predikat

Desa Budaya Maritim ini memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya berkaitan dengan ekonomi masyarakat.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2008: 240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang. Dokumentasi dilakukan guna memperoleh data berupa surat-surat, keputusan, arsip, dokumen-dokumen yang relevan dengan topik. Dalam penelitian, metode dokumentasi digunakan untuk mendukung proses penelitian dan juga untuk melakukan *cross-check* data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dokumentasi dapat pula berupa gambar atau foto maupun arsip. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti gambar, dan/atau elektronik.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah atau menelusuri data historis desa misalnya sejarah Desa Tileng, RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), peraturan desa maupun dokumen yang di butuhkan dan berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan memperoleh keabsahan data, diantaranya: teknik seperti observasi berljaut (*persistent observation*), triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi (*peerderieting*). (moleong, 2012:330).

Teknik pengecekan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Dimana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan maupun pembandingan terhadap data itu sendiri. Terdapat beberapa Langkah operasionalnya, diantaranya:

*pertama*, membandingkan data hasil obeservasi (pengamatan) dengan data hasil wawancara. *Kedua*, membandingkan apa yang di sampaikan orang di depan umum denga napa yang disampaikan secara pribadi. *Ketiga*, membandingkan apa yang di sampaikan orang-orang terkait kondisi penelitian denga napa yang dikatakannya sepanjang penelitian. *Keempat*, membandingkan kondisi dengan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat dan perspektif dari beragam kalangan seperti orang yang berpendidikan tinggi atau menengah, orang biasa, orang berada, serta orang pemerintahan.

## 5. Teknik Analisis Data

Sugiyono dalam Rustanto (2015) menjelaskan teknis analisis data ialah proses menelusuri dan Menyusun secara sistematis data yang didapat dari berbagai hasil seperti: wawancara, observasi (catatan lapangan), serta dokumentasi yang dilakukan dengan mengorganisasikan data kedalam ketegori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kesimpulan sampai mudah untuk dipahami oleh diri sendiri serta orang lain. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam analisis kualitatif ini, diantaranya:

### a. Pengumpulan Data

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di tulis ke dalam catatan lapangan yang terdiri dari aspek deskripsi dan releksi. Deskripsi berisikan tentang apa yang terjadi saat melakukan penelitian baik itu yang didengar, dirasakan, dilihat, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi merupakan catatan yang memuat komentar, tafsiran serta kesan penelti terkait apa yang ditemukan saat penelitian.

b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016), reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain reduksi data adalah proses penelitian, konsentrasi perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data yang datang dari catatan tertulis lapangan. Dengan begitu, data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data berikutnya serta mencarinya jika di perlukan.

c. Penyajian Data

Menurut Ahmad Rijali (2018) mengatakan bahwa penyajian data merupakan Tindakan pada saat gabungan informasi disusun, hingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data bisa berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik, bagan, matriks serta jaringan yang menggabungkan informasi hingga tersusun dalam sebuah bentuk yang padu dan mudah didapat yang kemudian memudahkan melihat apa yang sedang di alami atau terjadi, apakah kesimpulan sudan benar dan tepat atau sebaliknya melakukan analisis ulang atau kembali.

d. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, penelitian sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang di temui. Dari data yang diperoleh di lapangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN TILENG, KAPANEWEON GIRISUBO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Sejarah Kalurahan Tileng**

Sejarah desa Tileng di mulai dari tahun 1921 pecahnya perang besar antara Prabu Brawijaya V di kerajaan majapahit dengan Raden Patah deru kerajaan Demak. Di karenakan sebelum tahun 1921 diwilayah tileng banyak terjadi kekacauan dan kejadian-kejadian yang membuat resah warga, sehingga Panjenenganipun sinuwun Hamengku Buwono ingkang kaping VII dan diberi kuasa untuk memimpin menentramkan Tileng.

Setelah jaman kemerdekaan RI pemerintah membuat aturan yang menyebutkan bahwa pemimpin desa harus bisa membaca dan menulis, atas dasar tersebut, maka masa kepemimpinan dari Ki Lurah Kariyo Suparto di ganti oleh Bpk. Sugeng.

Dalam kepemimpinan Bpk. Sugeng terjadi pula pemekaran Padukuhan diantaranya; Padukuhan Manggung, Ngalangombo, Teken, Tileng, Mloko, Sentul, Ngasem, Nanas, Mandesanh, Pugeran, Papringan, Ngrombo, Sawah, Banaagung, Ploso dan Padukuhan Ngringin. Begitupula dengan masa kepemimpinan Kepala Desa di Kalurahan Tileng dari tahun 1921 sampai sekarang sudah mengalami pergantian 12 kali.

#### **B. Visi dan Misi Kalurahan Tileng**

##### **1. Visi**

Visi Kalurahan Tileng adalah “MAJU BARENG”. Rumusan visi ini merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tileng



baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga 6 (enam) tahun kedepan Kalurahan Tileng mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan tetap mengedepankan dan mengangkat nilai budaya yang ada di Kalurahan Tileng.

## **2. Misi**

- a. Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
- b. Transparansi pelaporan dan tata kelola pemerintahan desa
- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
- d. Maksimalisasi partisipasi (keterlibatan) warga masyarakat dalam proses pembangunan
- e. Maksimalisasi fungsi-fungsi kelembagaan
- f. Bersinergi dengan Lembaga sosial dan Lembaga masyarakat lainnya secara maksimal
- g. Maksimalisasi fungsi-fungsi tanah pertanian supaya lebih produktif
- h. Smart village

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan pembangunan desa harus terbuka serta mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sesama warga desa sehingga adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Tileng dapat mengalami kemajuan.

### **C. Deskripsi Keadaan Umum Kalurahan Tileng**

#### **1. Geografis**

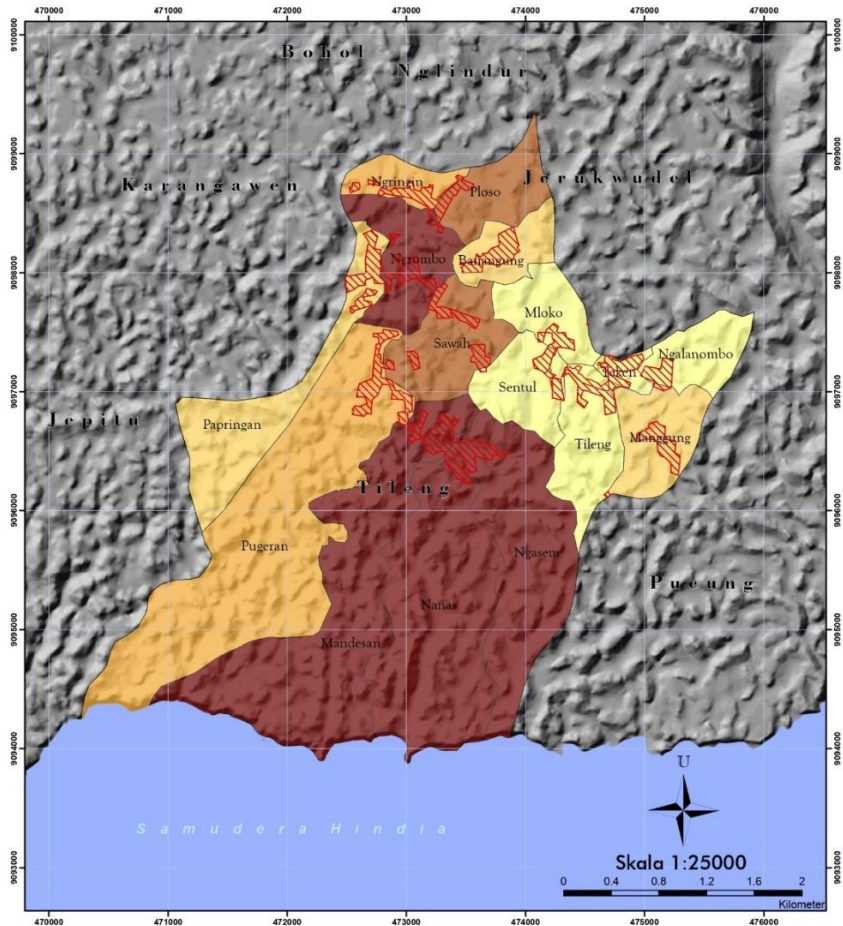
Keadaan geografis Kalurahan Tileng sebagian besar berada di pinggiran selatan Kabupaten Gunungkidul dengan kondisi wilayah terdiri atas 3 yakni pemukiman, tegalan sawah tadah hujan, dan sapadan laut atau kawasan pesisir. Kalurahan Tileng merupakan salah satu kalurahan yang ada di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 17.721 Ha, yang lahir pada tahun 1921. Tileng memiliki orbitan jarak pusat pemerintahan dengan kalurahan 2,5 Km, dari ibu kota kabupaten 40 Km dan dari ibu kota provinsi 80 Km, dengan berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara	: Kalurahan Nglindur
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Timur	: Kalurahan Pucung dan Kalurahan Jerukwudel
Sebelah Barat	: Kalurahan Karangawen dan Kalurahan Jepitu

Kalurahan Tileng jika dilihat pada peta terletak pada titik koordinat 110.74905 BT/ -8.172675 LS, dengan tipologi daerah Pesisir/nelayan dan berklasifikasi sebagai kalurahan Swasembada kategori Mula. Secara geografis Kalurahan Tileng berada pada ketinggian 300 mdpl, dengan topografi dataran tinggi serta banyaknya curah hujan 2000 mm. Pada ketinggian tersebut kalurahan ini bersuhu udara rata-rata 79 derajat Celcius.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kalurahan Tileng



PETA JUMLAH TERNAK SAPI DI DESA TILENG TAHUN 2017



Dari gambar berupa peta di atas, dapat kita lihat dan amati pemetaan wilayah administrasi di Kalurahan Tileng sangat luas, dan ada 16 Padukuhan yaitu Manggung, Ngalangombo, Tileng, Mloko, Sentul, Ngasem, Nanas, Mandesan, Pugeran, Sawah, Paprigan, Ngrombo, banagung, Ploso Ngringin dan tileng. Kalurahan Tileng memiliki 49 Rukun Tetangga (RT), 16 Rukun Warga (RW) yang mana tersebar

disetiap wilayah Kalurahan Tileng dan di tempati oleh 1.223 KK yang tersebar di setiap padukuhan. Hal ini sesuai dengan yang di amati oleh peneliti, dimana wilayah Kalurahan Tileng ini memiliki wilayah laut yang cukup Panjang serta sebagaian besar wilayah Kalurahan Tileng adalah lahan pertanian, hal ini dikarenakan banyak masyarakat kalurahan tileng yang berprofesi sebagai petani. Wilayah Kalurahan Tileng berada diperbukitan karts, sehingga sumberdaya air di wilayah ini masih sangat terbatas, apabila musim kemarau tiba wilayah Kalurahan Tileng sering di landa kekeringan.

## 2. Demografi

Secara demografi Kalurahan Tileng dapat kami gambarkan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

**Tabel 2.1**

**Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Jumlah Penduduk (orang)</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2)</b>
Laki-laki	2.181	4.368	1.223	4
Perempuan	2.187			

*Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022*

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa masyarakat Kalurahan Tileng yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.181 orang dan perempuan 1.187 orang sehingga jumlah keseluruhan masyarakat Tileng berjumlah 4.368 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Tileng masyarakat yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, meskipun tidak begitu jauh jarak jumlahnya. Dengan demikian jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.223 orang dengan kepadatan penduduk 4 Jiwa/KM2.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kalurahan Tileng hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa kuantitas perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kalimat lain, Kalurahan Tileng didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan.

Akan tetapi, kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Artinya, meskipun secara kuantitas, penduduk berjenis kelamin perempuan lebih dominan, itu tidak menjamin kualitas perempuan. Hal ini terjadi karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, kaum perempuan mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, memperoleh kesempatan kerja, dan mengakses ruang publik seperti musyawarah kalurahan. Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan keadaan ini, maka skema pembangunan di Kalurahan Tileng mesti seimbang antara pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik) dan pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial atau pembangunan non-fisik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran perempuan agar mampu berdaya dan menjadi pelaku aktif dalam agenda pembangunan yang diselenggarakan di Kalurahan Tileng. Pembangunan sosial bisa diaplikasikan dengan skema pemberdayaan yaitu pemberian kesempatan bagi perempuan untuk mendiskusikan, merumuskan, dan memutuskan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka.

## 2. Jumlah Penduduk Menurut Usia

**Tabel 2.2**

**Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>Kelompok Umur (Usia)</b>	<b>Laki-laki (Jiwa)</b>	<b>Perempuan (Jiwa)</b>
0-6 Tahun	125	119
7-12 Tahun	108	144
13-18 Tahun	178	189
19-25 Tahun	181	211
26-40 Tahun	453	490
41-55 Tahun	479	451
56-65 Tahun	312	276
65-75 Tahun	319	286
>75 Tahun	26	21
<b>Jumlah</b>	<b>2.181</b>	<b>2.187</b>

*Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022*

Dari tabel 2.2 dapat dilihat jumlah usia terbanyak 26-40 tahun yang berjumlah 943 orang dan yang jumlahnya paling sedikit berjumlah 47 yaitu di usia >75 tahun. Dimana Kalurahan Tileng memiliki banyak orang dewasa, terutama orang tua kalangan perempuan berjumlah 490 orang dan laki-laki 453 orang. Kemudian untuk yang berusia 75 tahun paling sedikit laki-laki mendominasi berjumlah 26 orang dan perempuan 21 orang.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kalurahan Tileng mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang sangat memadai untuk menopang pembangunan kalurahan. Apabila memakai logika penduduk dengan usia produktif, maka penduduk usia produktif Kalurahan Tileng berjumlah 2.265 jiwa. Dengan demikian, penduduk Kalurahan Tileng didominasi oleh penduduk dengan usia produktif.

Dengan formasi seperti ini, maka cita-cita untuk menjadikan Kalurahan Tileng sebagai entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kalurahan Tileng perlu

mengembangkan pola pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pola pembangunan yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan. Singkatnya, Pemerintah Kalurahan Tileng menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

### 3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

**Tabel 2.3**

**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
SD/ sederajat	340	231	571
SMP/ sederajat	330	211	541
SMA/ sederajat	501	238	739
S-1/ sederajat	80	60	140
<b>Jumlah Total (orang)</b>	<b>1.251</b>	<b>740</b>	<b>1991</b>

*Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022*

Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling dominan adalah tamatan SMA/ sederajat yang berjumlah 739 orang, yang terdiri 501 orang laki-laki dan 238 orang perempuan. Kemudian yang paling sedikit adalah lulusan Sarjana (S-1) yakni berjumlah 140 orang terdiri dari 80 orang laki-laki dan 60 orang perempuan. Sehingga, dapat disimpulkan secara tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat telah menyelesaikan diri dari wajib pendidikan wajib belajar.

Jika dibandingkan antara jumlah penduduk pada tabel 2.1 dengan jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan pada tabel 2.3 dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berjumlah 4.368 orang sedangkan untuk penduduk yang berpendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA dan S-1 berjumlah 1.991. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Kalurahan Tileng yang belum berpendidikan

berjumlah 2.377 orang. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: masih belum cukup umur untuk duduk di bangku Pendidikan, faktor didikan dan lingkungan sehingga mempengaruhi pola pikir anak, hal ini sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, peneliti melihat kebanyakan anak-anak di Kalurahan Tileng lebih suka bekerja daripada sekolah.

4. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencaharian

**Tabel 2.4**

**Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki (Jiwa)</b>	<b>Perempuan (Jiwa)</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
Petani	800	200	1.000
Buruh Tani	80	80	160
Ibu Rumah Tangga	0	640	640
Perangkat Desa	28	1	29
Buruh Harian Lepas	480	230	710
Jumlah Total (Orang)	1.388	1.151	2.539

*Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022*

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar masyarakat di Kalurahan Tileng berprofesi sebagai petani, dimana didominasi oleh laki-laki 800 orang dan disusul oleh perempuan berjumlah 200 orang. Kemudian pekerjaan sebagai perangkat Kalurahan didominasi oleh laki-laki 28 orang dan perempuan 1 orang, memperlihatkan minimnya peran perempuan dalam keterlibatan menjadi pamong kalurahan.

Jika dibandingkan antara jumlah penduduk pada tabel 2.1 dengan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan pada tabel 2.4 dapat dilihat dari jumlah penduduk 4.368 orang sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan



pekerjaan adalah 2.539. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Kalurahan Tileng yang belum memiliki pekerjaan berjumlah 1.829 orang.

5. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan

**Tabel 2.5**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

<b>Agama</b>	<b>Laki-laki (Jiwa)</b>	<b>Perempuan (Jiwa)</b>
Islam	2.157	2.157
Kristen	5	5
Katolik	18	24
Kepercayaan Kepda Tuhan YME	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>2.181</b>	<b>2.187</b>

*Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022*

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa masyarakat Kalurahan Tileng yang menganut agama Islam lebih dominan sebanyak 2.181 orang laki-laki dan 1.187 orang Perempuan. Nasrani baik Kristen maupun Katolik menjadi agama mayoritas di Kalurahan Tileng. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Tileng memeluk agama Islam. Akan tetapi, Tileng diberi penghargaan sebagai Desa Pancasila, karena kerukunan dan toleransi beragama yang cukup tinggi terjalin antar warga masyarakat.

**3. Sosial Ekonomi**

Adapun gambaran dari sosial ekonomi Kalurahan Tileng yang di dalamnya terdapat kelembagaan serta beberapa usaha ekonomi yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) terdiri atas 1 unit, dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 dan memiliki kepengurusan inti 6 orang.

2. Jasa Lembaga Keuangan terdiri atas Industri kecil dan menengah seperti industri makanan sejumlah 7 unit, dengan anggota kepengurusan sebanyak 35 orang.
3. Usaha Jasa dan Perdagangan yang terdiri atas usaha toko/kios sebanyak 6 unit, dengan jenis produk yang diperdagangkan (umum, sayur, barang dan jasa tambang, dll) dengan menyerap 9 orang tenaga kerja. Toko Kelontong sebanyak 75 unit yang menyerap 17 orang tenaga pekerja.
4. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM dan Air yang mana berupa Usaha Penyewaan Tenaga listrik sebanyak 1 unit, Pengeceran Gas dan Bahan Bakar 57 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 60 tenaga kerja.
5. Usaha Jasa Keterampilan yang terdiri dari Tukang Kayu 115 unit, Tukang Batu 134 unit, Tukang Jahit/bordir 16 unit, Tukang Cukur 1 unit, Tukang Service Elektronik 5 unit, dan Tukang Pijat/Pengobatan 16 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 287 orang.

Dari uraian di atas, dapat diketahui Bidang Pemberdayaan sosial sejauh ini di Kalurahan Tileng sudah terbangun dengan baik, terlihat dari adanya lembaga-lembaga pemberdayaan yang umumnya sudah dijalankan. Disisi lain, Kalurahan Tileng adalah Desa Pancasila dimana toleransi beragama yang sangat kuat dan tinggi. Masyarakat hidup rukun dalam perbedaan, dan sudah mampu berdaya secara ekonomi yang umumnya melalui sektor perranian. Dari sisi lingkungan, Kalurahan Tileng adanya pembangunan jalan sebagian besar sudah baik. Tidak hanya itu dari sisi lingkungan pemerintah kalurahan sudah berupaya untuk memberikan himbauan dan ajaka pelestarian lingkungan salah satunya dengan larangan

merokok dikeramaian. Tidak hanya itu aspek ini juga didukung dengan adanya sekolah alam yang mana diperuntukkan untuk mendorong berbagai aspek, tidak hanya alam tapi juga pelestarian budaya melalui kesenian.

Secara ekonomi dapat dikatakan sudah cukup stabil hal ini didukung dengan ketahanan pangan masyarakat yang cukup tangguh. Pemerintah kalurahan juga sudah berupaya untuk terus mendorong pembangunan ekonomi melalui adanya budaya maritim yang itu bergerak di sektor kelautan dan juga pertanian. Hal ini didukung dengan adanya kelompok pelaku ekonomi seperti pengrajin tempe, pengelola abon tuna, singkong, dan kacang tanah. Terkait median dan komunikasi pada dasarnya pemerintah kalurahan sudah memfasilitasi masyarakat melalui pembangunan tower jaringan demi mempermudah layanan komunikasi. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat umumnya melalui papan informasi yang terletak di beberapa tempat strategis. Tidak hanya itu, kalurahan sendiri telah memiliki web desa yang bisa diakses oleh masyarakat lokal dan dari luar terkait info seputar Kalurahan Tileng. Relasi komunikasi juga telah terjalin melalui forum-forum pemberdayaan yang ada.

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Secara umum Kalurahan Tileng telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti yang dapat kami jelaskan dibawah ini:

1. Prasarana transportasi darat yakni 1.5 panjang jalan konblok/semen/beton yang sejauh ini sudah cukup baik sepanjang 13.200 Km serta sarana transportasi darat 1 unit. Selain itu adanya transportasi sungai dengan kondisi cukup baik.

2. Prasarana komunikasi yang terdiri atas telepon 37.654 pelanggan GSM, tersedianya TV Umum 13, jumlah radio 782, dan Parabola 563 unit.
3. Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi di beberapa padukuhan yang terdiri dari sumur galian 9 unit, dan PAH 1267 unit. Sanitasi sumur resapan air rumah tangga sebanyak 4.301 rumah dan hampir semua memiliki jamban pembuangan yang layak.
4. Meskipun daerah yang mayoritas kegiatan masyarakat petani namun, hingga saat ini belum memiliki irigasi pengairan.
5. Sarana dan prasarana Pemerinthana seperti kantor kalurahan sudah ada, namun untuk balai kalurahan sendiri masih menggunakan jogyo pribadi milik Lurah.
6. Kalurahan Tileng memiliki lembaga pendidikan formal yang terdiri dari tingkat play group sejumlah 4 unit dengan status terakreditasi, 2 swasta yang kepemilikannya milik kalurahan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang. Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 6 unit telah terakreditasi yang mana 2 milik swasta dan 2 milik kalurahan dengan tenaga pengajar 7 orang. Terakhit Sekolah Dasar (SD) sejumlah 3 unit telah terakreditasi 3 milik pemerintah dengan tenaga pekerja 30 orang.
7. Adanya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan seperti kantor dan peralatannya, serta inventaris lainnya. Dalam hal ini lembaga-lembaga tersebut ialah Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Forum Kader Pemberdayaan Masyarakat, BUMKal, dan lembaga lainnya, meski demikian belum semua memadai.
8. sarana dan prasarana kesehatan dengan adanya Balai Pengobatan, Posyandu, Prakter Bidan maupun Dokter dan Rumah Bersalin.

9. Terdapat sarana energi dan penerangan listrik PLN di setiap rumah berjumlah 1.223 lokasi.

## **5. Budaya**

Kalurahan Tileng secara umum kaya akan budaya baik itu kesenian, dalam bertani, maupun dalam pola hidup sebagaimana kehidupan masyarakat di desa. Salah satunya adalah budaya pertanian “Tumpangsari” yang sudah secara turun temurun dilakukan. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran (*Polyculture*) berupa dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan. Tumpang sari yang umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan untuk dua jenis tanaman budidaya yang sama, seperti jagung dan kedelai, atau jagung dan kacang tanah. Di desa tileng ini para petani hanya mengandalkan curah hujan jadi mereka hanya memiliki kesempatan bertanam hanya satu kali dalam setahun, dan apa saja yang mereka tanam yaitu untuk ketersediaan pangan yaitu mereka menanam padi, singkong, dan jagung, dan setelah itu mereka menanam kacang tanah.

Selain itu, adanya kebudayaan dalam hal ini kesenian seperti Rasulan, Ketoprak, Jathilan, dan lainnya masih sangat akrab bagi masyarakat Kalurahan Tileng. Rasulan sendiri merupakan buaya bersih desa atau bentuk wujud syukur dari masyarakat kepada Tuhan sang pencipta atas hasil panen yang mereka dapatkan. Dalam tradisi ini masyarakat di Kalurahan Tileng biasanya melaksanakan berbagai kegiatan kesenian atau pertunjukan busada seperti jathilan wayang, reog dan sebagainya. Banyak nilai yang diambil dari kegiatan ini. Kegiatan seperti ini memberikan ikatan tersendiri bagi warga di sana dimana disini adanya saling berkunjung antar warga yang mempererat tali persaudaraan mereka.

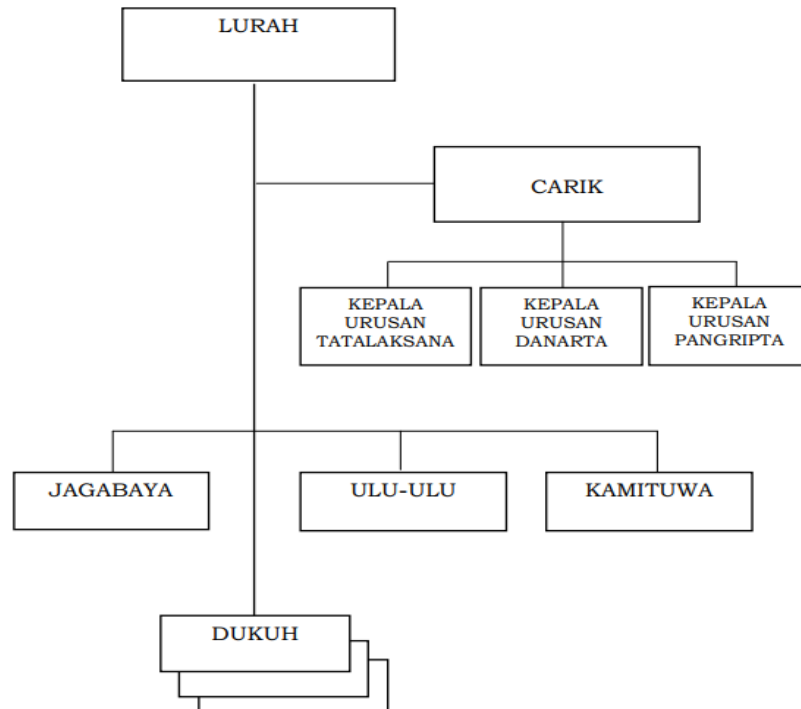
Kebudayaan lain yang masih dipertahankan bagi Kalurahan Tileng adalah kebiasaan gotong royong. Hal ini dapat dilihat pada even-even penting seperti pada perayaan peringatan hari besar nasional, hari besar keagamaan maupun kegiatan-kegiatan lain dari Kalurahan. Adanya grup-grup seni dari muda-mudi di Kalurahan Tileng membantu mereka mempertahankan dan mengembangkan nilai budaya-budaya seperti ini dengan mengekspresikan kemampuan mereka masing-masing.

## 6. Pemerintahan

Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul, DIY dipimpin oleh Suwardi, S.Pd selaku Lurah, dengan struktuk sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Struktur Pemerintahan Kalurahan Tileng**



Dari struktur di atas masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

**a. Tugas dan Fungsi Lurah**

Lurah berkedudukan sebagai kepala pemerintah kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Saat ini, Kalurahan Tileng dipimpin oleh Suwardi. Sebagai Lurah, Suwardi bertugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan.

Tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang diemban oleh Suwardi mencakup; tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententeraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Tugas untuk melaksanakan pembangunan yang diemban oleh Suwardi meliputi: pembangunan sarana prasarana kalurahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

Tugas untuk pembinaan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan tugas untuk pemberdayaan masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, Karang Taruna. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan di Kalurahan Tileng, Suwardi juga

bertugas untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

**b. Tugas dan Fungsi Carik**

Carik adalah sebutan untuk Sekretaris di Kalurahan Tileng. Carik berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan Tileng. Saat ini, Carik Kalurahan Tileng dijabat oleh Edi Saraya. Sebagai Carik, Edi Saraya bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.

Tugas Carik adalah sebagai berikut: *Pertama*, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. *Kedua*, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. *Ketiga*, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya. *Keempat*, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan (APBKal), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.



**c. Tugas dan Fungsi Jagabaya**

Jagabaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pemerintahan dan keamanan. Saat ini, Jagabaya Kalurahan Banguntapan Tileng dijabat oleh Sudiyono. Sebagai Jagabaya, Sudiyono bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan dan keamanan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan.

**d. Tugas dan Fungsi Ulu-Ulu**

Ulu-Ulu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pembangunan dan kemakmuran. Saat ini, Ulu-Ulu Kalurahan Tileng dijabat oleh Wijiati. Sebagai Ulu-Ulu, Wijiati bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pembangunan dan kemakmuran serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang tata ruang.

**e. Tugas dan Fungsi Kamituwa**

Kamituwa berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang kemasyarakatan. Saat ini, Kamituwa Kalurahan Tileng dijabat oleh Mesran. Sebagai Kamituwa, Mesran bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.

**f. Tugas dan Fungsi Danarta**

Danarta berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Danarta Kalurahan Tileng dijabat oleh Sugimin. Sebagai Danarta, Sugimin bertugas membantu Carik dalam urusan

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan keuangan dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

**g. Tugas dan Fungsi Tata Laksana**

Kaur Tata Laksana Kalurahan Tileng diemban oleh Bondhan Gendroyono. Sebagai Kaur Tata Laksana, Bondhan Gendroyono mempunyai beberapa fungsi yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi pamong kalurahan, penyediaan pamong kalurahan, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Singkatnya, Kaur Tata Laksana bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

**h. Tugas dan Fungsi Pangripta**

Pangripta berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Pangripta Kalurahan Tileng dijabat oleh Ridhu Yesanto. Sebagai Pangripta, Ridhu Yesanto bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan ketatausahaan, umum dan perencanaan.

**i. Tugas dan Fungsi Dukuh**

Setiap padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh. Dukuh berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: *Pertama*, pembinaan ketenteraman dan

ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. *Kedua*, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. *Ketiga*, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

*Keempat*, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**Tabel 2.6****Susunan Pemerintah Kalurahan Tileng sebagai berikut:**

No.	Nama	Jabatan
1.	SUWARDI, S.Pd	LURAH
2.	EDI SARAYA, S.Pd	CARIK
3.	SUDIYONO	JAGABAYA
4.	MESRAN	KAMITUWA
5.	WIJATI	ULU-ULU
6.	BONDHAN GENDROYONO, S.T	Kaur. TATALAKSANA
7.	SUGIMIN, S.IP	Kaur. DANARTA
8.	RIDHU YESANTO, S.Pd	Kaur. PANGRIPTA
9.	MARGONO, S.IP	Dukuh Manggung
10.	MISDIYANTA	Dukuh Ngalangombo
11.	SUJARWO	Dukuh Teken
12.	SUYATIN	Dukuh Tileng
13.	MARSAIT	Dukuh Mloko
14.	SUTIKNO	Dukuh Sentul
15.	SUWARNO	Dukuh Ngasem
16.	HERU NUFYANTA	Dukuh Nanas
17.	SAGIMIN	Dukuh Mandesan
18.	PANGAT	Dukuh Pugeran
19.	SUHARNO	Dukuh Papringan
20.	KARSIMIN	Dukuh Ngrombo
21.	VINSENSIUS SUBAYATO	Dukuh Sawah
22.	RUBIYO	Dukuh Banagung
23.	MURSIYANTO	Dukuh Ploso
24.	EKA INDRIYATNA	Dukuh Ngringin
25.	MADIYA	Staf Pamong Kalurahan
26.	BODENG SRIYATNO	Staf Pamong Kalurahan
27.	SUBANDIYANTA	Staf Pamong Kalurahan

*Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022***7. Program Kerja Kalurahan Tileng**

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut

dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Terdapat beberapa program pembangunan Kalurahan Tileng yang di tetapkan melalui RPJMKal Tileng, yakni:

1. Membangun dan meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mendirikan sekolah alam pesisir di Kalurahan Tileng serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkiat seperti perguruan tinggi yang bisa dan Dinas terkait yang bisa dan ada relevansinya.
2. Pembangunan insfrastruktur yang mampu mengakses untuk mobilisasi penduduk untuk perekonomian yaitu Jalan Antar Dusun, Antar Kalurahan dan Jalan Usaha Tani.
3. Pembangunan yang mengarah Kalurahan Budaya Maritim berupa gedung olahan dan pertokohan di seputaran Jalur Jalan Lintas Selatan (JLLS) serta mengakses obyek wisata seperti pantai atau laut
4. Pembangunan yang menunjang adanya wisata alam dan edukasi

5. Pengembangan pembangunan yang menuju Kalurahan Primer yang berbahan baku hasil pertanian, peternakan serta hasil laut yang menjadi kearifan lokal.
6. Pembangunan yang berbasis teknologi dan penguatan pelayanan berbasis IT
7. Peningkatan kapasitas pamong untuk meningkatkan pelayanan yang berbasis IT dan ramah serta mempermudah pelayanan.

**8. Rencana Kegiatan dan program pembangunan desa budaya maritim menggunakan dana BKK Dana Keistimewaan Pemerintah Kalurahan Tileng (2022).**

Pada tahun 2022 Kalurahan Tileng mendapatkan dana keistimewaan sebesar 750.000.000, penerimaan dana keistimewaan ini menggunakan dua tahap. Pada tahap I Kalurahan Tileng menerima dana keistimewaan sebesar *Rp.346.443.000*, sedangkan pada tahap kedua pemerintah Kalurahan Tileng menerima *Rp.403.557.000*. Dana keistimewaan ini kemudian digunakan oleh pemerintah Kalurahan Tileng untuk pembangunan desa budaya maritim, adapun beberapa kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah Kalurahan Tileng:

No.	Program dan kegiatan	Realisasi penggunaan Dana keistimewaan (RP)	Manfaat	keterangan
1.	Pelebaran jalan menuju sekolah alam	70.333.000	Akses jalan menuju sekolah alam lebih nyaman dan aman.	Sudah di laksanakan dan tidak ada kendala
2.	Pengadaan melebeller	36.387.000	Untuk memfasilitasi setiap kegiatan yang dilaksanakan di gedung sekolah alam	Pengadaan sudah sepebuhnya selesai
3.	Pembangunan MCK sekolah alam	72.277.0000	Mengurangi pencemaran lingkungan dan membuat lingkungan bersih dan sehat	Pembangunan sudah selesai
4.	Penyempurnaan rumah olahan dan peralatan	150.659.000	Untuk menjaga hasil masakan atau olahan lebih higienis dan bermutu	Pengerjaan sudah selesai.
5.	Rabat beton jalan menuju sekolah alam dan rumah olahan	72.460.000	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan menuju sekolah alam dan rumah olahan	Sudah sepenuhnya selesai
6.	Pagar sekolah alam	26.516.000	Kondisi gedung lebih rapi serta pemanfaatan gedung akan lebih aman dan barang yang ada di gedung lebih aman	Sudah sepenuhnya selesai.
7.	Pembuatan tempat parkir	97.124.000	Tersedianya tempat parkir yang memadai	Sudah sepenuhnya selesai
8.	Pelatihan kepada masyarakat (nelayan dan masyarakat lainnya)	15.921.000	Meningkat sumber daya manusia terkait budaya maritim	Masih terus berjalan
<b>Jumlah</b>		<b>541.677.000</b>		

(Sumber: laporan realisasi penggunaan dana keistimewaan pemerintah Kalurahan Tileng 2022)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kegiatan atau program pembangunan budaya maritim sudah berjalan, pembangunan pada tabel di atas lebih banyak pada pembangunan infrastruktur yang mana memiliki manfaat yang dapat mendorong lajunya pembangunan budaya maritim di Kalurahan Tileng. Dengan terlaksananya kegiatan dan program seperti pada tabel di atas tentunya memberikan dampak yang bagus bagi pembangunan desa budaya maritim Kalurahan Tileng kedepannya. Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan program di atas berjumlah 541.677.000 dari dana keistimewaan berjumlah 750.000.000 yang di terima Kalurahan Tileng. Sisa dari dana keistimewaan ini akan digunakan untuk kegiatan dan program selanjutnya.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, dalam membangun budaya maritim, Pemerintah Kalurahan Tileng berupaya untuk bersinergi dengan dinas yang terkait dengan budaya maritim. Saat ini Pemerintah Kalurahan Tileng bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan pembangunan desa budaya maritim di Kalurahan Tileng. Pemerintah Kalurahan Tileng menempatkan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengolahan potensi laut. Sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang potensi dari budaya maritim.

*Kedua*, adapun program pembangunan budaya maritim yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng, di antaranya: *pertama*, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dengan menghadirkan narasumber yang ahli untuk memberi bekal kepada masyarakat terkait bidang kemaritiman. *Kedua*, mendirikan sekolah alam. *Ketiga*, membentuk kelompok-kelompok yang bisa di bina untuk mengelolah hasil laut atau hasil tangkapan dari nelayan. *Ketiga*, menyediakan tempat berupa Gedung olahan hasil laut. *Keempat*, membangun ruko-ruko.

*Ketiga*, adapun kendala yang dihadapi dalam pembangunan budaya maritim, yaitu: 1) minimnya sumber daya manusia; 2) terbatasnya bahan baku; 3) keterbatasan dana; 4) minimnya partisipasi masyarakat; 5) terbatasnya sumber daya fasilitas; dan 6) kerjasama antara Pemerintah Kalurahan Tileng dan masyarakat masih lemah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah Kalurahan Tileng diharapkan agar meningkatkan kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait pembangunan budaya maritim. Pemerintah Kalurahan Tileng hendaknya tidak hanya melibatkan DKP untuk dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat saja, tetapi juga Pemerintah diharapkan melibatkan DKP dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan budaya maritim.
2. Diharapkan Program dan kegiatan terkait budaya maritim yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan sungguh-sungguh berbasis pada kebutuhan masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat memahami dan mendukung lajunya pembangunan budaya maritim di Kalurahan Tileng.
3. Diharapkan Pemerintah Kalurahan Tileng lebih meningkatkan kerjasama dengan masyarakat agar dapat mengoptimalkan lajunya pembangunan budaya maritim, disisi lain Pemerintah Kalurahan Tileng diharapkan meningkatkan program dan kegiatan yang dapat menambah pemahaman masyarakat terkait budaya maritim. Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan budaya maritim diharapkan di siapakan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Burnnet taylor, E. (1988). *Wayang, Kebudayaan Indonesia, dan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- dkk, E. M. (2006). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Cook, S. (2007). *Ruling But Not Governing: The military and political development in egypt, Algeria, and turkey, Baltimore, MD*. Chicago: Jonh Hopkins University Press.
- Ostrom, E. (2015). *Governing The Commons: The Evolution Of Institution Action* . Cambridge University Press.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, S. (2015). *regulasi baru desa baru*. jakarta pusat: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan pembangunan desa* . Jakarta: Kemendes Dan PDTT.
- Kusnadi. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. &. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Setiadi, E. M. (2006). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sutoro, E. (2014). *Undang-undang Desa Republik Indonesia Tentang desa*. Yogyakarta: Forum Prngrmbangan dan Pembaharuan Desa (FPD).
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Pengumpulan Instrumen Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong Lexy. (2002). *metode penelitian kualitatif*. bandung: CV. Remaja.
- Sugiyono. (2008). *penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. bandung: alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kuliitatif, dan R & d*. Bandung: alfabeta,CV.
- Bamabang, R. (2015). *penelitian kualitatif pekerja sosial*. bandung: rosdha karya.
- Rijali, A. (2018). *analisis data kualitatif*. UIN Antasari bajarmasin.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kuliitatif, dan R & d*. Bandung: alfabeta,CV.
- Supartono. (2001). *ilmu budaya dasar*. jakarta: ghalia Indonesia
- Wahyu, K. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kemendes.
- Garniwa, d. S. (2007). *Prilaku organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Purnowo, S. H. (1996). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Silalahi, U. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Reflika Aditama.

## **JURNAL;**

Widyanto Pudyo P, M. A. (2022). Peran Intelijen Maritim Guna Membangun Budaya Maritim Indonesia sebagai Pilar dalam Kebijakan Poros maritim dunia . *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol 4 no 5, 2685-9351.

Kambey, M. A. (2020). Eksistensi Budaya Maritim Kelompok Nelayan Kalurahan Malalayang Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 8(1), 136-146.

Chairunnisa, I. R. (2019). Pemahaman Budaya Maritim Masyarakat Pantai Depok Kabupaten Bantul. *Media Komunikasi Geografi*, 20(2), 199-210.

Kamim, A. B. (2018). Pemerintah Sebagai Agen Perubahan Sosial Yang Direncanakan: Study Atas Pembangunan Kemaritiman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(2), 95-120.

Sugianto, S. (2020). Optimalisasi Kemandirian Kelautan Dalam Mewujudkan Pembangunan Budaya Maritim Nasional. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 19(1).

Widodo, A. M. (2020). Pengaruh Teknologi Panel Surya Dan Budaya Maritim Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Maritim (Studi Kasus: Pulau Pasaran Provinsi Lampung). *Keamanan Maritim* 6(1).

Suroto, H. &. (2018). Budaya Maritim Di Pesisir Utara Papua (Maritim Culture in The Papua North Coast). *Jurnal Penelitian Arkeologi Papua dan Papua Barat*, 10(1), 63-74.

Marwati, T. (2018). Peran Hukum Dalam Pemabangunan Budaya Maritim Indonesia. *Jurnal Litigasi* 19(2).

Asrini, T. N. (2019). Pendidikan Maritim Membangun Jati Diri Indonesia Sebagai Negara Maritim. *Wawasan Sosial Budaya Maritim*.

Towadi, M. P. (2022). Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah. *Akuntansi dan Humanjora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 99-107.

Imron, M. &. (2018). Penelitian Sosial Budaya Maritim pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI dan Sumbangannya pada Kebijakan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 20 (1), 123-142.

Firmansyah, M. I. (2016). Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara BPJS Kesehatan dengan Organisasi Profesi Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. *Jurnal Universitas Airlangga*. Vol 4 No 2, 146-156.

Rahmawati, T. d. (2014). Sinargrtitas Stakeholderss Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro)). *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas Brawijaya. Vol 2, No 4, 641-647.

Yunanto, Sutoro Eko. *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintah*. Governabilitas, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.

**UNDANG-UNDANG;**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Identitas Informan

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

#### A. Daftar Pertanyaan untuk Pemerintah Kalurahan Tileng

1. Bagaimana bapak/ibu memandang kondisi ekonomi masyarakat di Kalurahan Tileng?
2. Menurut bapak/ibu, mengapa perlu adanya desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?
3. Menurut bapak/ibu, potensi apa saja yang mendorong pembangunan budaya Maritim di Kalurahan Tileng?
4. Apa saja sumber-sumber nelayan yang ada di Kalurahan Tileng?
5. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Tileng mengelola sumber daya nelayan tersebut?
6. Bagaimana kerja sama Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun desa budaya maritim?
7. Setau bapak/ibu, apa saja bentuk kerja sama dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?
8. Siapa saja yang terlibat kerja sama dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?

9. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun desa budaya maritim?
10. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Tileng bekerja sama dalam Merumus Kebijakan membangun desa budaya maritim?
11. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Tileng menjalankan kebijakan membangun desa budaya maritim?
12. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng?
13. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Tileng melibatkan masyarakat dalam membangun desa budaya maritim?
14. Apa saja kebutuhan yang dapat menopang membangun desa budaya maritim?
15. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun desa budaya maritim?
16. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan Tileng dalam kerja sama membangun desa budaya maritim?
17. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Tileng mengatasi kendala tersebut?

**B. Daftar Pertanyaan untuk Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)**

1. Bagaimana bapak/ibu memandang keadaan ekonomi di Kalurahan Tileng?
2. Menurut bapak/ibu, mengapa Kalurahan Tileng perlu adanya membangun desa budaya maritim?
3. Setau bapak/ibu, potensi apa saja yang dapat mendorong pembangunan desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?
4. Setau bapak/ibu, Siapa saja pihak yang terlibat dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?

5. Dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng, apakah ada musyawarah terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh BPKal?
6. Setau bapak/ibu, Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah tersebut?
7. Menurut bapak/ibu, apa saja yang dibahas dalam musyawarah tersebut?
8. Bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam musyawarah BPKal terkait membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?
9. Setau bapak/ibu, bagaimana respon pemerintah Kalurahan Tileng terhadap aspirasi masyarakat?
10. Setau bapak/ibu, bagaimana kerja sama antara BPKal dan Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun desa budaya Maritim?
11. Bagaimana BPKal mengontrol dalam membangun desa budaya maritim?
12. Setau bapak/ibu, sejauh ini apa saja kendala yang dihadapi oleh BPKal dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?
13. Bagaimana bapak/ibu, mengatasi kendala tersebut?

### **C. Daftar Petanyaan untuk Dukuh Kalurahan Tileng**

1. Bagaimana bapak/ibu memandang keadaan ekonomi di Kaluraha Tileng?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait budaya maritm di Kalurahan Tileng?
3. Setau bapak/ibu, potensi apa saja yang dapat mendorong pembangunan desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?
4. Menurut bapak/ibu, adakah manfaat yang di terima oleh masyarakat maupun padukuhan dengan adanya budaya maritim?
5. Setau bapak/ibu, kebijakan apa saja yang telah di buat pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun desa budaya maritim?
6. Dalam membangun desa budaya maritim, apakah dukuh dan masyarakat di libatkan?



7. Setau bapak/ibu, apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun desa Budaya maritim?
8. Setau bapak/ibu, apakah pemerintah Kalurahan Tileng melakukan hubungan komunikasi dengan dukuh maupun masyarakat dalam membangun desa budaya maritim?
9. Setau bapak/ibu apakah pemerintah melakukan koordinasi dengan dukuh maupun masyarakat dalam membangun desa budaya maritim?
10. Setau bapak/ibu, adakah kendala yang dihadapi dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?

**D. Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Kalurahan Tileng**

1. Bagaimana bapak/ibu memandang kondisi ekonomi di Kalurahan Tileng?
2. Menurut bapak/ibu, dengan adanya membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng, apa manfaat bagi masyarakat?
3. Setau bapak/ibu, potensi apa saja yang dapat mendorong pembangunan desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?
4. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?
5. Setau bapak/ibu, Apakah pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam membangun desa budaya maritim?
6. Setau bapak/ibu, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Tileng dalam membangun desa budaya maritim?
7. Menurut bapak/ibu, seperti apa bentuk keterlibatan masyarakat dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?
8. Dalam membangun desa budaya maritim, apa saja fasilitas yang diperoleh masyarakat?

9. Bagaimana kerja sama pemerintah Kalurahan Tileng dengan masyarakat dalam membangun desa budaya maritim?
10. Setau bapak/ibu, apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam membangun desa budaya maritim di Kalurahan Tileng?

## DOKUMENTASI



(Wawancara peneliti dengan Bapak Suwardi, Lurah Kalurahan Tileng Pada 23/01/2023)



(Wawancara peneliti dengan Bapak Wagito, Ketua BPKal Tileng pada 20/01/2023)



(Wawancara peneliti dengan Bapak Edi, Carik Kalurahan Tileng pada 25/01/2023)



(Wawancara peneliti dengan Bapak Bondan, Kaur Tata Laksana Kalurahan Tileng pada 25/01/2023)



(Wawancara peneliti dengan Bapak Dwi, Anggota BPKal Tileng pada 20/01/2023)



(Wawancara peneliti dengan Bapak Sutikno, Dukuh Padukuhan Sentul pada 19/01/2023)





(Wawancara peneliti dengan Bapak Sujarwo, Dukuh Padukuhan Teken pada 20/01/2023)



(Wawancara peneliti dengan Ibu Yuni, Ketua Kelompok Pengolah Hasil Laut Kalurahan Tileng pada 20/01/2023)



(Wawancara peneliti dengan Ibu Lusi, Masyarakat Pedagang Ikan Kalurahan Tileng pada 19/01/2023)



(Wawancara peneliti dengan Ibu Wida, Masyarakat Kalurahan Tileng pada 19/01/2023)



(Wawancara peneliti dengan Ibu Jamal,  
Masyarakat Pedagang Ikan Kalurahan Tileng  
pada 23/01/2023)



(Wawancara peneliti dengan Ibu Jamal,  
Masyarakat Nelayan Kalurahan Tileng  
pada 23/01/2023)





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317, Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 153/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Valentinus TriPutra Jehadut  
No. Mahasiswa : 19520117  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022  
Judul Proposal : Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi

  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 029/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Valentinus Triputra Jehadut  
Nomor Mahasiswa : 19520117  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul  
b. Sasaran : Sinergitas Pemerintah Desa dalam Membangun Desa Budaya Maritim  
(Studi Terhadap Pemerintah Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
c. Waktu : 16 Januari 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 16 Januari 2023



**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 055/I/U/2023  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Lurah Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 16 Januari 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

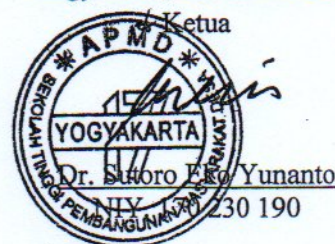
Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Valentinus Triputra Jehadut  
No Mhs : 19520117  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Sinergitas Pemerintah Desa dalam Membangun Desa Budaya Maritim (Studi Terhadap Pemerintah Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Deaerah Istimewa Yogyakarta)  
Tempat : Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul  
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Januari 2023







KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON GIRISUBO  
PEMERINTAH KALURAHAN TILENG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦩꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ

Jl. Wediombo Km . 1 Banagung, Tileng, Girisubo, Gunungkidul 55883 Pos : 55883  
Posel : desatileng@gmail.com Laman : [www.tileng-girisubo.desa.id](http://www.tileng-girisubo.desa.id) (085726427057)

Tileng , 17 Januari 2023

Nomor : 070/ 17 /I/2023

Lamp. :-

Hal : Pemberian ijin Penelitian

Kepada :

Yth. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Dengan Hormat.

Menindaklanjuti Surat Dari Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa  
"APMD" Yogyakarta Nomor 055/I/U/2023 Tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Ijin  
Penelitian di kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

Nama : Valentinus Triputra Jehadut  
NIM : 19520117  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan – S1  
Judul Skrepsi : Sinergritas Pemerintah Desa Membangun Desa Budaya Maritim  
( Studi terhadap Pemerintah Tileng, Kapanewon Girisubo kabupaten  
Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)  
Waktu : 16 Januari 2023 s/d selesai  
Lokasi : Kalurahan Tileng

Dengan ini Pemerintah Kalurahan Tileng memberikan ijin kepada nama tersebut diatas  
untuk melakukan kegiatan tersebut.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama :

Nomor Mahasiswa :

Judul :

Dosen Pembimbing :

Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
21/10/22	Buat Prop lengkap	
27/11/22	Revisi Proposal (Latar belakang, Fokus Penelitian, Literatur Review)	
30/11/22	Revisi Proposal (Latar belakang, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian)	
5/12/22	Revisi Proposal (Huruf kecil dan besar)	
7/03/23	- Revisi Bab II (Analisis Temuan dilapangan, Program Kerja) - Bab III (Mempertajam Perspektif Beraring, Tambahkan data hasil observasi dan dokumentasi)	
5/04/23	- Revisi Bab II (Perkaya Analisis, Tambahkan Data yang terkait dengan budaya Maritim) - Revisi Bab III (Tambahkan Hasil Wawancara unsur Informan)	
2/05/23	- Mempertajam Beraring terkait Desa budaya Maritim Dalam "Sinergitas"	



9/5.23

Ace uji

f

Mengetahui / Menyetujui  
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

Dosen Pembimbing :

B. Hari Saptang P.